

KIAT BLUSUKAN

Panduan Pengelolaan Kunjungan ke Dapil



KIAT BLUSUKAN

Panduan Pengelolaan Kunjungan ke Dapil

Penulis: Alvin Lie

Kiat Blusukan

Panduan Pengelolaan Kunjungan ke Dapil

Penulis:

Alvin Lie

Kontributor:

Agus Wijayanto;
Danardono Siradjuddin;
Diana Sa'adah;
Guwon Rizki;
Trias H Utomo;
Wiwik Widyastuti;
Yoenarsih Nazar;
Widya Anggraini;
Christina Dameraia.

Ilustrator:

Deni Rodendo

Tata letak:

Galih Gerryaldy

HAK CIPTA

Buku ini disusun dan dikembangkan oleh USAID/Program Representasi (ProRep) yaitu sebuah program pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diimplementasikan oleh Chemonics International. Isi buku sepenuhnya merupakan tanggung jawab Chemonics International dan tidak mewakili pandangan USAID maupun pemerintah Amerika Serikat. Sebagian atau seluruh isi buku ini boleh diperbanyak atau direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan ijin tertulis dari USAID/ProRep, dan dengan mencantumkan secara jelas kontribusi USAID/ProRep sebagai pemegang hak cipta yang sah dari publikasi ini.

Tentang Publikasi Buku ini

Buku ini ditujukan untuk membantu para Anggota DPR beserta stafnya melakukan kegiatan ke daerah pemilihan dan mengambil manfaat maksimal dari kegiatan tersebut. Buku ini memaparkan secara runut langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan serta menindaklanjuti kunjungan ke daerah pemilihan secara lebih efektif dan bermakna yang dilakukan oleh Anggota DPR secara reguler.

Komentar, masukan atau pertanyaan mengenai buku ini dapat disampaikan kepada:

Program Representasi

Gedung BRI II Suite 2806

Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA

Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016,

Email: info@prorep.or.id

www.prorep.or.id

Informasi lain, termasuk versi elektronik buku panduan ini, tersedia dalam halaman website Program Representasi di www.prorep.or.id.

Daftar Singkatan

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPS	: Badan Pusat Statistik
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
Jabat	: Jangkau dan Libatkan (Salah satu program dari ProRep yang dirancang untuk membantu Anggota DPR (yang berpartisipasi) dalam meningkatkan efektifitas manajemen hubungan dengan konstituennya)
UU	: Undang-undang
Setjen	: Sekretariat Jenderal
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PPPK	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PIIP	: Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
ProRep	: Program Representasi
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
USAID	: United States Agency for International Development atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat

PENGANTAR

Kata “Blusukan” berasal dari bahasa Jawa yang lebih-kurang bermakna gesit bergerak menembus berbagai halangan, memasuki ruang dan celah baru yang belum banyak diketahui. Belakangan ini istilah Blusukan sering dikaitkan dengan kegesitan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, yang rajin keluar-masuk perkampungan, pasar dan ruang-ruang publik, untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan warganya. Semuanya dilakukan dengan gaya khas Jokowi, sebutan populer Joko Widodo, yang santai, informal dan akrab oleh warganya.

Gaya Blusukan ini ternyata mendapat sambutan hangat dari warga yang sudah jenuh dengan gaya formal dan kaku yang dipertunjukkan oleh para pejabat dan petugas pemerintahan. Wajar jika kemudian Blusukan diterima dan diterapkan oleh tokoh-tokoh politik dalam melakukan pendekatan dengan warga.

Interaksi dan komunikasi antara Anggota DPR dengan warga yang diwakilinya, sering mendapat sorotan. Banyak warga di Daerah Pemilihan (Dapil) yang tidak mengenal Anggota DPR yang mewakilinya. Demikian pula tidak sedikit Anggota DPR yang merasa perlu mengenal lebih baik konstituennya, namun menghadapi kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Buku ini ditujukan untuk membantu Anggota DPR dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan menindaklanjuti kunjungan ke Daerah Pemilihan, agar lebih efektif menjalin komunikasi dan interaksi dengan warga yang diwakilinya. Walau demikian, penulis yakin bahwa anggota DPD RI dan anggota DPRD dapat juga memanfaatkan buku panduan ini.

Demikian juga, buku ini dapat bermanfaat sebagai rujukan staf Anggota DPR dalam membantu Anggota DPR agar kunjungan ke Dapil dapat terlaksana lebih lancar, lebih efisien dan efektif.

Lebih jauh lagi, dengan membaca buku ini diharapkan para Calon Anggota DPR RI dan DPD RI yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum tahun 2014, dapat memperluas pengetahuannya tentang pengelolaan kunjungan ke Daerah Pemilihan, setelah terpilih.

APBN mengalokasikan anggaran cukup besar untuk Kunjungan ke Daerah Pemilihan. Diharapkan buku ini dapat ikut meningkatkan efektifitas kunjungan Anggota DPR ke Daerah Pemilihannya, agar biaya yang difasilitasi negara tersebut benar-benar bermanfaat mempererat interaksi antara rakyat dengan Anggota DPR yang mewakilinya.

Penulisan buku ini dilandasi pengalaman penulis sebagai anggota DPR selama dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009, serta observasi penulis terhadap pola hubungan Wakil Rakyat dengan Rakyat. Pengalaman para anggota DPR yang berpartisipasi dalam program JABAT (Jangkau dan Libatkan), ikut memperkaya bahan penulisan ini.

Mengingat politisi pada umumnya mempunyai waktu sangat terbatas untuk membaca, penulis mencoba menyampaikan materi-materi secara singkat dengan gaya bahasa ringan dan didukung infografis untuk memudahkan pembaca cepat menangkap substansinya.

Selamat membaca dan semoga semakin sukses membangun interaksi dengan konstituen.

Jakarta, Januari 2014.

Alvin Lie

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR PROREP

Ilmuwan politik Nelson Polsby menyebut parlemen sebagai “pemerintahan yang tidak berujung” karena parlemen dan anggotanya dapat berkinerja secara efektif apabila mereka berhubungan dengan, mendengarkan, memahami kebutuhan dan memperhatikan aspirasi konstituen mereka, dan kemudian dapat membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional untuk ditindaklanjuti. Ini adalah teori. Tantangannya adalah, dalam kehidupan nyata, sangat sulit untuk menempatkan teori ke dalam praktek.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah buku pedoman telah diterbitkan yang dirancang untuk membantu anggota parlemen di berbagai negara untuk lebih memahami dan mewakili kepentingan konstituennya. Sementara publikasi dari buku-buku tersebut berguna sebagai panduan umum, **Kiat Blusukan** adalah panduan khusus untuk Indonesia, dirancang untuk Anggota Parlemen Indonesia. Tips Blusukan ditulis oleh Alvin Lie, mantan Anggota Parlemen Indonesia yang selama sepuluh tahun bekerja secara dekat dengan konstituen dan kelompok-kelompok di Daerah Pemilihannya, dan telah melakukan banyak kunjungan reses yang sukses.

Kiat Blusukan berisi tentang metode yang telah terbukti membantu anggota parlemen dan stafnya dalam merencanakan dan mengimplementasikan kunjungan reses yang efektif, dan yang bermanfaat baik bagi anggota parlemen maupun konstituennya. Mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, maka buku ini juga menjelaskan cara praktis bagi anggota parlemen Indonesia untuk dapat secara efektif menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan konstituennya. Terakhir, penulis adalah juga seorang yang ahli dalam hal yang berkaitan dengan media, dan buku ini menyajikan beberapa tips praktis untuk membantu anggota parlemen mengelola hubungan dengan media komunikasi, mengadakan konferensi pers, dan merancang siaran pers.

Kiat Blusukan dibuat sebagai bagian dari program JABAT, singkatan dari “**J**Angkau dan **LiBAT**kan”. Program ini dilaksanakan pada tahun 2012 hingga tahun 2013 sebagai sebuah kerjasama antara USAID/ProRep dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Program ini dirancang untuk membantu para anggota DPR yang berpartisipasi dalam meningkatkan pengelolaan hubungan dengan konstituen dengan menjadi anggota DPR yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap orang-orang yang mereka wakili.

Kami berharap buku **Kiat Blusukan** ini berguna sebagai panduan sekaligus bacaan yang menyenangkan.

John K. Johnson

WAKIL KETUA DPR RI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salah satu tugas utama seorang wakil rakyat adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi antara warga dengan Wakil Rakyat merupakan landasan utama dalam mewujudkan keberhasilan sistem demokrasi perwakilan seperti yang berlaku di Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, Peraturan Tata Tertib DPR RI mewajibkan Anggota DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihannya setiap masa reses dan juga diluar masa reses, sedikitnya satu kali dalam dua bulan. Kunjungan ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Anggota DPR RI yang mewakilinya.

Harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal wakilnya di DPR. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi seputar kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Buku "Kiat Blusukan" ini memuat tips praktis yang dapat membantu Anggota DPR RI meningkatkan efektifitas dan produktifitas kunjungannya ke Daerah Pemilihan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas hubungan antara Wakil Rakyat dengan konstituennya.

Buku ini juga padat dengan kiat-kiat yang dapat diterapkan, bukan hanya teori belaka, dan disajikan dalam format ringan dan mudah dicerna.

Apresiasi saya sampaikan kepada penulis, Alvin Lie, yang merupakan konsultan USAID - Program Representasi (ProRep), yang juga pernah menjadi Anggota DPR RI masa bakti 1999-2004 dan 2004-2009, atas upaya dan kesediaannya menerbitkan buku ini. Saya yakin buku ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Anggota DPR RI beserta stafnya, namun juga bagi mereka yang bercita-cita menjadi anggota DPR RI.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Wakil Ketua DPR RI
Periode Tahun 2009-2014

PENDAHULUAN

Anggota DPR adalah orang-orang terpilih yang mendapat mandat secara demokratis dan konstitusional untuk mewakili warga di Daerah Pemilihan (Dapil) dalam memperjuangkan kepentingan mereka, menyuarakan pendapat dalam pembuatan kebijakan negara dan mencari solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi Dapil. Namun sehari-hari waktu Anggota DPR terkuras di Jakarta, seakan tercabut dari Dapil. Kesempatan untuk bertemu, berdialog dan berinteraksi antara rakyat dengan Wakilnya menjadi langka. Kedekatan yang terjalin antara politisi dengan konstituennya terbelah oleh jarak dan keterbatasan waktu.

Sebenarnya baik Anggota DPR maupun warga di Dapil, sama-sama membutuhkan komunikasi dan interaksi untuk menghubungkan Senayan dengan Dapil. Anggota DPR perlu lebih mengenali konstituennya, sehingga pendapat dan langkah politiknya mewakili sikap, aspirasi dan kepentingan Dapil. Demikian pula warga di Dapil perlu mengetahui apa saja yang dilakukan, diperjuangkan dan dihasilkan oleh Wakilnya di Senayan. Kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan pengelolaan hubungan konstituen yang efektif, termasuk manajemen kunjungan ke Dapil.

Apabila cermat mengelola interaksi dengan warga di Dapil, Anggota DPR akan lebih cepat memperoleh informasi komprehensif mengenai permasalahan, situasi, potensi dan tantangan yang berkembang di Dapil, sehingga dapat lebih mantap menyuarakan kepentingan Dapil di gedung parlemen. Demikian juga warga di Dapil akan selalu mendapat informasi tentang perjuangan dan hasil kerja Anggota DPR yang mewakilinya. Kunjungan ke Dapil membuka peluang komunikasi tatap muka dengan sentuhan personal yang akan memperkuat citra yang dibangun Anggota DPR melalui penampilan diberbagai media. Warga yang sering dikunjungi oleh Anggota DPR merasa lebih terwakili dan tersantuni. Kualitas kunjungan ke Dapil merupakan investasi politik untuk meningkatkan kredibilitas dan memelihara elektabilitas Anggota DPR.

Membangun interaksi yang produktif dengan konstituen melalui kunjungan ke Dapil, menuntut perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta tindak lanjut yang dilakukan secara sistematis. Pemanfaatan waktu, anggaran, informasi serta sumber daya lainnya perlu dikelola cermat agar tujuan dan sasaran kunjungan tercapai. Kerja sama Anggota DPR dengan staf merupakan unsur kunci sukses pengelolaan kunjungan ke Dapil.





DAFTAR ISI



Bab 1

Peraturan dan Kemudahan Untuk Kunjungan ke Dapil

Mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil) dan berinteraksi dengan warga di Dapil, bukanlah Hak Anggota DPR, melainkan suatu KEWAJIBAN yang diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pasal 79, dan Peraturan Tata Tertib DPR RI pada Bab XIV tentang Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, khususnya pasal 203 dan 204.

Peraturan Tata Tertib DPR juga mengamanatkan bahwa kunjungan ke Dapil tidak hanya saat Reses saja, namun sedikitnya sekali dalam setiap dua bulan atau sedikitnya enam kali dalam setahun.



Informasi, aspirasi dan temuan yang didapatkan selama kunjungan ke daerah pemilihan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi Anggota DPR RI untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPR RI. Untuk itu, Anggota DPR diberi Hak Keuangan untuk membiayai kunjungan ke Dapil.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan fasilitas dan anggaran serta untuk menindaklanjuti hasil kunjungan, Anggota DPR wajib membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan di akhir kunjungan yang diserahkan kepada Setjen DPR dan Fraksi masing-masing.





Bab 2

Misi Kunjungan



1. Akuntabilitas politik

Anggota DPR selaku pengemban mandat dari konstituen di Dapil, berkewajiban moril untuk secara berkala dan teratur menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat. Kunjungan ke Dapil dalam masa reses maupun diluar masa reses, merupakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan akuntabilitas politik tersebut. Proses ini sekaligus menjadi pendidikan politik bagi konstituen untuk mengetahui proses, prosedur dan mekanisme kerja politik di DPR.

Pada kunjungan resesnya di bulan Mei 2013 ke kota Bengkulu, Anggota DPR RI Ibu Dewi Coryati, menyelenggarakan serangkaian lokakarya tentang pengenalan parlemen untuk pemula yang diikuti lebih dari 300 mahasiswa/siswa di provinsi Bengkulu.

Dari kegiatan ini terungkap bahwa sebelum mengikuti lokakarya, kebanyakan peserta kurang memahami fungsi dan tata kerja DPR RI dan bahkan mempunyai persepsi negatif terhadap DPR RI.

Namun setelah mengikuti lokakarya, mereka menjadi memahami fungsi dan manfaat keberadaan parlemen serta peran dan tugas seorang Anggota DPR.

Selain itu, para peserta yang tadinya tidak mengenal satupun anggota DPR yang mewakili daerahnya, menjadi kenal dan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh Anggota DPR yang mewakili daerahnya.



Foto oleh: © USAID/Program Representasi –Widya Anggraini

Informasi yang dapat dilaporkan kepada konstituen antara lain mencakup:

1. Proses dan keputusan politik

Anggota DPR dapat dan perlu menjelaskan kepada konstituen tentang proses dalam pembuatan suatu keputusan politik/kebijakan, terutama yang berdampak pada konstituen. Hal ini termasuk informasi tentang pihak-pihak yang dilibatkan, masukan dan pendapat yang terjaring, serta tahapan yang dilalui hingga keputusan/kebijakan tersebut dibuat.

2. Pertimbangan dalam pilihan politik

Anggota DPR juga perlu menjelaskan pertimbangan pribadinya atau fraksi mengapa memilih sikap tertentu terkait suatu permasalahan atau kebijakan. Misalnya, mengapa dirinya atau fraksi menolak atau mendukung pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

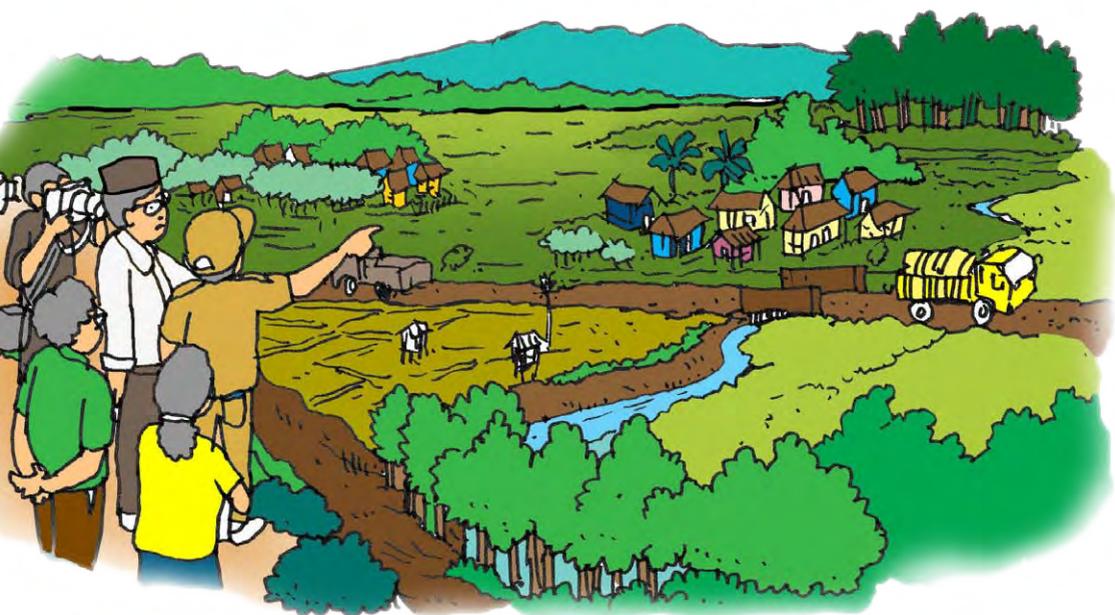
3. Kegiatan dan kinerja selama kurun waktu tertentu

Kunjungan ke Dapil dapat dimanfaatkan untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR, termasuk rapat dan forum yang dihadiri serta hasil capaiannya. Informasi tentang kegiatan dan kinerja Anggota DPR akan bermanfaat meluruskan mispersepsi publik bahwa Anggota DPR hanya Datang, Duduk, Diam, Dapat Duit.



4. Pemenuhan komitmen politik atau janji-janji kampanye

Janji adalah hutang yang harus dilunasi oleh Anggota DPR terpilih. Kunjungan ke Dapil dapat menjadi media untuk menyampaikan laporan kepada konstituen tentang langkah dan upaya yang telah ditempuh oleh Anggota DPR dalam mewujudkan komitmen atau janji-janji di masa kampanye. Laporan tersebut akan mematahkan persepsi bahwa setelah terpilih, Anggota DPR melupakan janji dan kewajibannya terhadap Dapil.





2 Menjaring masukan dan aspirasi

Keberadaan Anggota DPR yang sehari-hari di Jakarta, sangat membatasi konstituen untuk berkomunikasi, bertanya, menyampaikan keinginan dan pendapat. Demikian pula publik sering merasa kesulitan memperoleh informasi maupun dokumen tentang RUU yang sedang dibahas di Senayan. Kunjungan Anggota DPR ke Dapil, diharapkan dapat merespon kebutuhan tersebut.

Dengan melakukan kunjungan ke Dapil, Anggota DPR berkesempatan untuk mengamati secara langsung, kondisi nyata Dapil terkait infrastruktur dan kondisi sosial. Pengetahuan ini akan menjadi modal dalam mempengaruhi kebijakan alokasi sumber daya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dapil terkait.

TIPS: Berkunjung ke Dapil bermanfaat untuk:

1. Mendengarkan keluhan dan menjaring masukan;
2. Menyaksikan sendiri kondisi nyata;
3. Mendengarkan pendapat, gagasan dan saran;
4. Menampung permintaan dan kebutuhan;



3. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan

Kunjungan ke Dapil merupakan kesempatan bagi Anggota DPR untuk mensosialisasikan keputusan atau sikap politik yang diambil selama masa persidangan, termasuk berbagai pertimbangan, tujuan dan hasil yang diharapkan dari keputusan tersebut, baik dalam kapasitas pribadi maupun selaku anggota Fraksi atau Alat Kelengkapan DPR.

Sosialisasi perihal alokasi APBN serta program-program untuk Dapil, juga akan mendorong masyarakat untuk aktif berperanserta dan mengawasi pelaksanaan program-program terkait.

Jika terdapat perbedaan antara sikap politik pribadi dan fraksi terkait sebuah produk Undang-undang atau kebijakan yang dihasilkan, Anggota DPR perlu menjelaskan kepada konstituen Undang-undang/ kebijakan merupakan produk politik dalam sistem demokrasi, dimana suara mayoritas yang akan menang. Undang-undang/ kebijakan yang sudah diputuskan melalui mekanisme demokratis, menjadi suatu konsensus nasional yang bersifat mengikat baik terhadap pihak yang mendukung, maupun yang tidak sepatutnya.

Produk-produk politik yang perlu disosialisasikan mencakup:

- Undang-undang, peraturan, alokasi anggaran, program;
- Kebijakan negara/ pemerintah;
- Sikap politik partai/ fraksi.

Pada reses bulan Mei 2013, Anggota DPR RI Bapak Budiman Sudjatmiko dalam kunjungan ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyelenggarakan diskusi publik membahas RUU tentang Desa. Forum ini dihadiri 106 Kepala Desa se-kabupaten Cilacap.

Mereka mengikuti paparan tentang perubahan regulasi terkait desa, termasuk arah pengembangan desa dan pembangunan masyarakat desa, yang tercantum dalam draft RUU tentang Desa. Selain berhasil mensosialisasikan RUU tentang Desa, kegiatan ini juga bermanfaat mengklarifikasi pasal-pasal krusial dalam RUU tersebut.



Foto oleh: © USAID/Program Representasi – Trias H. Utomo



4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD

Kerja sama dengan pemangku kepentingan daerah mutlak diperlukan agar tercipta sinergi, terutama terkait tindak lanjut terhadap permasalahan yang merupakan ranah Daerah, alokasi anggaran dan program untuk Daerah serta permasalahan Daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan/anggaran Pusat.



Foto oleh: © USAID/Program Representasi – Diana Saadah

Pada kunjungan reses bulan Januari 2013, Anggota DPR RI, Ibu Eva Kusuma Sundari bertemu dengan 72 relawan program Keluarga Berencana (KB) dalam diskusi publik di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Dalam forum ini, para relawan KB menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, pendapat, serta harapannya kepada Ibu Eva, yang kemudian membahasnya bersama para pejabat pemerintah daerah, Anggota DPRD, dan wartawan yang hadir.

Pada akhir diskusi, aspirasi yang disampaikan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani semua pihak sebagai wujud komitmen bersama untuk tindak lanjut.





5. Mendalami potensi dan permasalahan

Observasi dan diskusi langsung dengan para pemangku kepentingan di Dapil bermanfaat bagi Anggota DPR untuk memahami secara mendalam potensi daerah maupun permasalahan yang dihadapi konstituennya. Pemahaman ini penting dalam membuat kebijakan dan sikap politik.

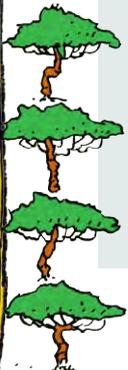


Foto oleh: © USAID/Program Representasi – Ali Samian

Pada kunjungan reses bulan Juli 2013, Anggota DPR RI Teguh Juwarno mengunjungi Desa Pajagan dan Desa Negla di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, untuk berdialog dengan warga yang sebagian besar adalah petani.

Dari diskusi tersebut, Bapak Teguh menemukan bahwa warga sering kekurangan air selama musim kering serta kesulitan dalam mendistribusikan hasil panen mereka.

Sebagai solusi, Bapak Teguh memberikan komitmennya untuk membahas permasalahan tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum serta dinas lain yang terkait untuk mendapatkan alokasi dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) agar warga desa dapat membangun saluran irigasi dan jalan.





6. Memantau realisasi program APBN & implementasi Undang-undang/ kebijakan

Kunjungan ke Dapil merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR, terutama terkait implementasi sebuah perundangan/kebijakan/program serta dampak/kemanfaatannya bagi masyarakat di Dapil.



7. Merespon suatu kejadian yang berdampak luas

Anggota DPR wajib merespon secara cepat kejadian luar biasa di Dapil, seperti bencana alam atau bencana industri, wabah penyakit, konflik sosial dan sebagainya. Dengan mengunjungi langsung lokasi kejadian, Anggota DPR akan mempunyai informasi komprehensif untuk mendorong tindakan tanggap darurat Pemerintah serta alokasi sumber daya nasional dan APBN dalam program pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.



8. Memperkenalkan diri kepada khalayak yang lebih luas

Dengan berkunjung ke Dapil Anggota DPR berpeluang untuk mengenal serta dikenal oleh khalayak yang lebih luas di Dapil, terlepas dari sekat kepartaian karena Anggota DPR adalah milik seluruh warga di Dapilnya, bukan hanya milik simpatisan dan kader partainya.

Semakin luas dikenal, semakin sering berinteraksi, akan meningkat pula kemantapan dan kepercayaan konstituen terhadap Anggota DPR, yang pada akhirnya, akan meningkat pula elektibilitas Anggota tersebut untuk terpilih kembali.



a. Misi Utama Kunjungan;

Misi Utama kunjungan sebaiknya dirumuskan dengan baik agar kegiatan & tema pembahasan selama kunjungan tetap fokus. Misi sebaiknya kontekstual atau relevan dengan kondisi daerah dan responsif terhadap masalah yang ada di Dapil. Konsistensi terhadap Misi Utama kunjungan memudahkan persiapan bahan, meringkai pemikiran, dan menjalin kerja sama dengan media untuk pemberitaan.

Walau demikian, kunjungan ke Dapil harus bersifat dinamis, agar Anggota DPR dapat merespon sesuatu yang berada di luar Misi Utama bila dirasa cukup penting.



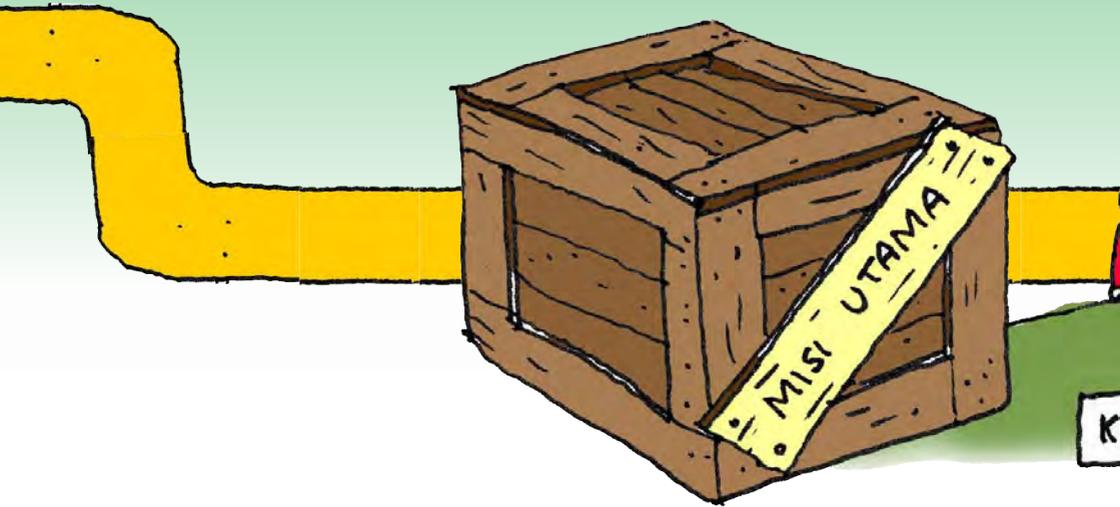
b. Menetapkan target dan tolok ukur kesuksesan

Mengingat bahwa masa kunjungan ke Dapil maksimal hanya 5 hari kerja, sedangkan banyak pihak yang harus ditemui dan lokasi yang harus dikunjungi, Anggota DPR perlu sangat selektif memilih pihak yang akan ditemui, kegiatan yang akan dihadiri alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata acara dan juga target yang ingin dicapai.

Target sebaiknya spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki tenggat waktu. Hal ini akan memudahkan evaluasi pada akhir kunjungan.

Target kuantitatif dapat berupa jumlah acara yang akan dihadiri, lokasi yang dikunjungi dan jumlah orang yang ditemui.

Sedangkan target kualitatif dapat berupa perubahan sikap atau peningkatan pemahaman, kesepahaman, atau adanya pernyataan dukungan oleh kelompok kepentingan tertentu dan sebagainya.



c. Menentukan jadwal, alokasi waktu dan lokasi kegiatan;

Semua kegiatan Anggota DPR maupun para Staf selama kunjungan ke Dapil perlu dirancang **sequence** (urutan), jadwal dan alokasi waktunya. Rancangan ini mencakup tahap persiapan, pelaksanaan hingga tindak lanjut pasca kunjungan.

Perencanaan jadwal dan alokasi waktu bermanfaat membantu kendali (**check and recheck**) terhadap berbagai aspek kegiatan untuk memastikan bahwa kunjungan ke Dapil dapat terlaksana lancar.

Lokasi harus dipilih yang sesuai dengan sifat dan alokasi waktu kegiatan. Aspek perijinan, cuaca, keamanan, biaya dan kenyamanan perlu dijadikan pertimbangan. Jarak tempuh dan kondisi jalan antara satu lokasi kegiatan dengan lokasi kegiatan lainnya berpengaruh terhadap alokasi waktu kegiatan. Oleh karena itu, pastikan perencanaan kegiatan, pemilihan lokasi dan penyusunan jadwal dan alokasi waktu terintegrasi dengan baik.



d. Memilih mitra diskusi dan mitra kerja;

Mitra diskusi dan mitra kerja yang tepat dapat meningkatkan efektifitas kunjungan ke Dapil. Tokoh, pakar, kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan yang relevan perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan untuk dijadikan mitra diskusi dan/atau mitra kerja untuk merespon kondisi di Dapil.

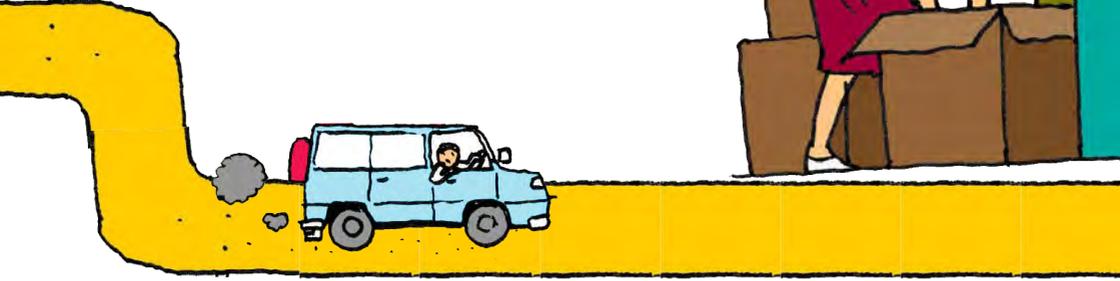
Bilamana dipandang perlu, dapat juga dipertimbangkan mengundang mitra diskusi/mitra kerja yang tidak berada di Dapil namun pengetahuan, pendapat atau pengaruh yang berpotensi menjadi bagian dari solusi permasalahan di Dapil.

e. Menentukan bentuk kegiatan/acara;

Kegiatan selama kunjungan perlu dirinci dan dikelola secara jelas dan mendukung tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila tujuannya untuk observasi, kegiatan dapat dilaksanakan secara diam-diam atau *incognito* untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Jika tujuan kegiatan adalah untuk berdiskusi, forum dapat diselenggarakan bersifat resmi, seperti dengan Bupati, DPRD maupun Dinas-dinas di daerah, dan atau informal seperti forum diskusi dengan warga.

2. Persiapan

Untuk memastikan rencana yang tersusun dapat terlaksana dengan baik dan target yang tercapai, diperlukan persiapan yang komprehensif. Informasi awal tentang kondisi dan perkembangan permasalahan di daerah, pemetaan kekuatan kepentingan dan berbagai informasi relevan lainnya diperlukan agar Anggota DPR tidak menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan selama kunjungan ke Dapil.



a. Informasi terkini tentang kondisi Dapil;

Sangat penting bagi Anda sebagai Anggota DPR untuk memahami permasalahan terkini dan yang belum terselesaikan di Dapil. Informasi ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yang dapat diandalkan, mudah dan tanpa biaya besar, seperti:

Pemberitaan di media massa;

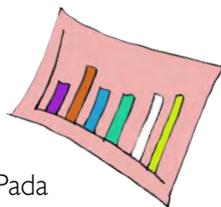
Selain media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, Media **online** dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memantau perkembangan di Dapil. Namun dengan banyaknya jumlah media, pemantauan pemberitaan menjadi sangat menyita waktu dan tenaga. Sebagai alternatif, Anggota DPR dapat memanfaatkan jasa **Media Monitoring** dan **Issue Tracking** patut dipertimbangkan. Selain lebih praktis, biayanya tidak terlalu besar, umumnya juga dilengkapi dengan analisis dari kalangan praktisi dan profesional.





Data Statistitik;

Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memperkaya dan mempertajam bahan-bahan yang akan disajikan atau dibahas dalam kunjungan ke Dapil. Pada umumnya data statistik tersebut dapat diperoleh secara cuma-cuma.



Laporan resmi pemerintah;

Salah satu sumber informasi yang berharga adalah laporan Pemerintah Daerah, kantor dinas, kementerian dan lainnya, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan untuk umum, namun tidak bersifat rahasia. Dokumen seperti ini hanya dapat diperoleh jika pihak yang membutuhkan aktif mendatangi instansi terkait untuk meminta, contohnya adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hasil survei/penelitian;

Saat ini cukup banyak survei yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti lembaga penelitian, media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kelompok lain yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Hasil survei ini berfungsi sebagai data sekunder dan dapat digunakan untuk bahan tinjauan, presentasi, pembahasan, dan serta membantu pemecahan masalah.

**Analisis pakar/industri;**

Untuk mempertajam bahan presentasi dan diskusi serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan sikap terhadap permasalahan di Dapil, Anggota DPR dapat memanfaatkan pendapat atau analisis para pakar. Anggota DPR dapat bekerja sama dengan pakar yang mempunyai visi dan kepedulian yang sama. Pakar tersebut bisa saja kader sesama partai atau jaringan pertemanan pribadi.

Apabila diperlukan pendapat lebih luas, dapat juga memanfaatkan sumber sekunder seperti dengan survei, pendapat dan analisa para pakar yang banyak dipublikasikan, baik melalui media massa maupun media sosial.

Laporan kelompok kepentingan;

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Asosiasi, Perkumpulan dan kelompok-kelompok pemerhati permasalahan khusus, sering mempunyai informasi spesifik terkini, terkait bidang yang mereka dalam. Bekerja sama dengan mereka dapat mendatangkan manfaat bersama. Anggota DPR memperoleh pasokan informasi akurat dan terkini, kelompok kepentingan terbantu mendapatkan solusi atau permasalahan yang mereka tekuni, terangkat menjadi isu kebijakan.

**b. Menyiapkan alternatif solusi;**

Ada kalanya kunjungan ke Dapil adalah untuk merespon suatu permasalahan atau menindaklanjuti keluhan/masukan/aspirasi konstituen. Bila Anggota DPR sudah mengetahui permasalahan yang sedang berkembang di Dapil, kunjungan akan lebih produktif jika alternatif solusi sudah dipersiapkan sebelum berangkat. Namun, alternatif solusi yang disiapkan sebaiknya telah dikaji kelayakannya dan kemungkinan pelaksanaannya agar ia tak hanya menjadi angin surga bagi konstituen.

Beberapa bentuk langkah yang dapat disiapkan sebagai alternatif solusi adalah:

- Menghubungkan pihak terdampak atau pemangku kepentingan dengan lembaga/pejabat pelaksana;
- Memperkenalkan pihak-pihak yang dapat membantu atau memediasi pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bagian dari kerja politik untuk konstituen;



Foto oleh: © USAID/Program Representasi – Wawan Irmansyah

Anggota DPR RI Ibu Andi Timo dalam kegiatan resesnya pada bulan Juli 2013, berdiskusi dengan kelompok usaha kecil dalam Lokakarya Kewirausahaan di kota Palopo Sulawesi Selatan. Kelompok ini sebelumnya tidak pernah dibina maupun menerima pembekalan mengenai akses permodalan dari lembaga perbankan.

Dengan menghadirkan kepala cabang Bank BRI serta Wakil Walikota Kota Palopo, Ibu Andi Timo berhasil membuat kesepakatan bersama, dimana Kepala Cabang Bank BRI berkomitmen memberikan kemudahan pinjaman KUR kepada kelompok usaha kecil di kota ini. Demikian pula Wakil Walikota juga menyatakan komitmen untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan anggaran dalam APBD.

Selaku anggota DPR RI, Ibu Andi Timo berkomitmen mendorong alokasi APBN ke Kota Palopo bagi pengembangan usaha kecil serta berjanji untuk membantu memfasilitasi pemasaran hasil produksi dari usaha kecil.

- Menggalang dukungan politik untuk mengubah kebijakan/peraturan;
- Mengalokasikan sumber daya negara: Solusi diperjuangkan agar masuk dalam program APBN atau APBN-P;
- Membuka akses informasi dan komunikasi. Tidak semua masalah dapat diselesaikan seketika, dalam kunjungan ke Dapil. Sebagai komitmen untuk tetap berkomunikasi dan mendampingi konstituen, hingga permasalahan tuntas, Anggota DPR dapat memberikan alamat kontak kepada para pemangku kepentingan di Dapil, agar mereka dapat selalu menyampaikan perkembangan, masukan atau kebutuhan informasi;



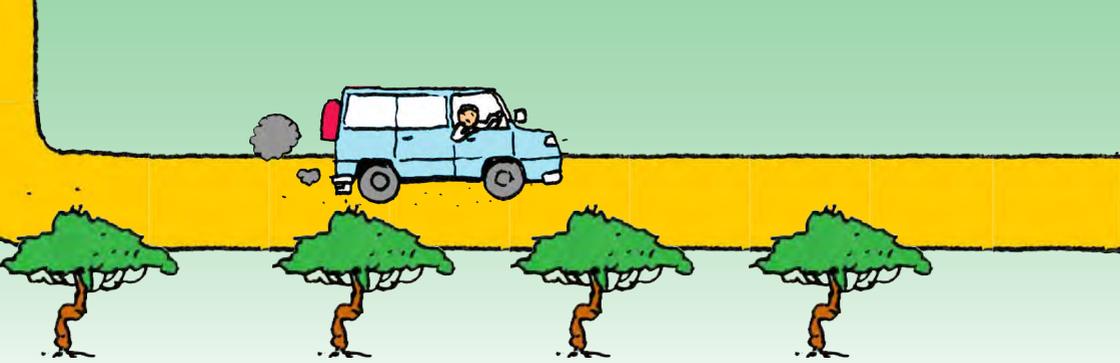
Anggota DPR RI, Bapak Yahya Sacawiria pada kunjungan resesnya di bulan Juli 2013, menyelenggarakan dialog dengan warga desa Cihaurkuning, Garut, Jawa Barat. Dialog tersebut mengungkapkan permasalahan desa tertinggal ini, khususnya terkait kondisi infrastruktur, terutama jalan, yang masih buruk dan licin sehingga tidak bisa mendukung daya jual hasil-hasil pertanian, kondisi gedung sekolah (madrasah) yang kurang layak, tingkat pendidikan warga yang masih rendah, dan rendahnya akses publik terhadap program pemerintah dari daerah maupun pusat.

Dalam rangka membantu penyelesaian masalah tersebut, Bapak Yahya menyanggupi untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pihak-pihak terkait dan menyarankan warga untuk tetap berkomunikasi dengannya agar dapat memantau perkembangannya.

Beliau kemudian memberikan nomor handphone dan alamat e-mail/ surat elektroniknya kepada seluruh warga yang hadir.

- Memobilisasi potensi publik. Bilamana memungkinkan, Anggota DPR dapat mencoba menggalang solidaritas dan potensi masyarakat setempat untuk mengatasi suatu masalah. Jika berhasil, langkah itu tak hanya akan membangun kemandirian, namun juga memastikan keberlanjutan dari solusi tersebut. Masyarakat setempat akan merasa lebih bangga serta ikut memiliki, sehingga akan memelihara solusi yang terwujud atas karya mereka sendiri;





- Melakukan advokasi dan memberi saran. Konsekuensi logis dari komunikasi yang terbuka dengan konstituen, adalah menyediakan waktu bagi mereka untuk berkonsultasi. Pemikiran, nasehat, saran dan rekomendasi Anggota DPR akan sangat bermanfaat bagi konstituen dalam mengatasi permasalahan publik. Perlu diingat bahwa konsultasi warga tidak harus selalu dilakukan oleh Anggota DPR sendiri, namun dapat juga didelegasikan kepada staf yang kompeten;

c. Membuat dan konfirmasi jadwal pertemuan dan acara;

Agar optimal, sebaiknya semua pihak, termasuk tokoh dan kelompok-kelompok kepentingan setempat, yang akan ditemui, dikonfirmasi ulang untuk memastikan kesediaannya dan kecocokan jadwal bersama.

Dalam kunjungan ke Dapil, pada umumnya Anggota DPR perlu bertemu dan bekerja sama dengan:

- Tokoh setempat;
- Kelompok kepentingan;
- Pemerintah setempat;
- Pimpinan Partai/Fraksi setempat;
- Media lokal;



d. Menyusun Acara dan Forum Pertemuan;

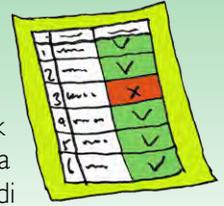
Beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Anggota DPR dan para staf, adalah;

Kiat Blusukan

Panduan Pengelolaan Kunjungan ke Dapil

Acara atau Kegiatan Terbuka;

Kegiatan ini dapat diselenggarakan atas inisiatif sendiri (atau bekerja sama dengan pihak lain) dimana Anggota DPR bertindak sebagai Tuan Rumah atau Pengundang. Kegiatan dapat juga diselenggarakan oleh pihak lain dimana Anggota DPR menjadi tamu yang diundang.



Jika acara merupakan inisiatif sendiri, maka tim Anda perlu menyiapkan tempat, menyusun acara, daftar peserta/tamu yang diundang, jadwal kunjungan, susunan acara, serta menyiapkan keperluan logistik acara.

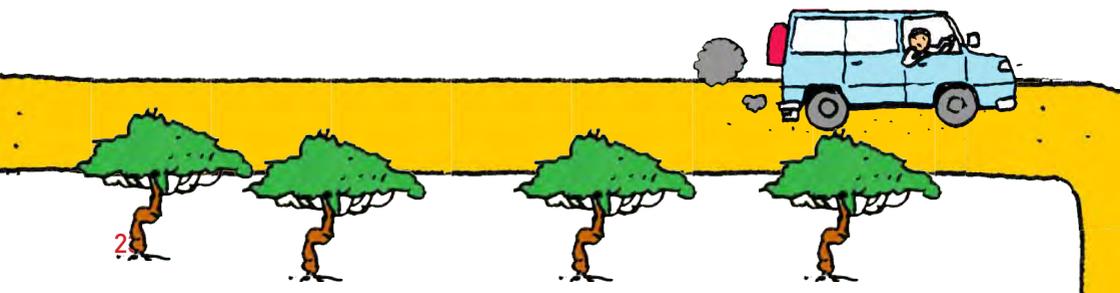
Namun apabila Anggota DPR adalah pihak yang diundang, staf perlu mengkonfirmasi ulang waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, dan peran Anggota DPR dalam acara tersebut.

Dalam mengatur jadwal kunjungan ke tempat umum atau keramaian seperti pasar, tempat ibadah, sekolah, sanggar kesenian dll, perlu dirancang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan ditempat tersebut, jumlah peserta rombongan dan pemilihan waktu berkunjung agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ditempat yang dikunjungi.

Format acara dapat disesuaikan dengan karakter audiens tanpa mengorbankan substansi komunikasi. Misalnya, dalam acara dengan kawula muda, dapat disisipi hiburan musik dan tari agar suasana menjadi lebih cair dan akrab.

Kunjungan silaturahmi;

Kunjungan silaturahmi perlu dilakukan untuk memelihara dan mempererat hubungan baik dengan para relawan serta simpatisan di Dapil dan para tokoh dari lembaga/kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tak langsung memberikan dukungan kepada Anggota DPR. Kunjungan ini bersifat kekeluargaan, tanpa target spesifik.



Rapat & diskusi;

Rapat dan forum diskusi merupakan forum yang lebih formal dan terarah. Agenda dan arah pembahasan akan lebih terkendali apabila forum diselenggarakan oleh Anggota DPR sendiri, dibanding apabila Anggota DPR menghadiri forum yang diselenggarakan pihak lain.

Waktu penyelenggaraan perlu memperhatikan jam kerja dan/atau kebiasaan di Dapil, agar mengurangi hambatan bagi para mitra yang diundang untuk menghadiri forum tersebut.

Akan lebih baik jika para undangan diberi informasi awal tentang latar belakang serta tujuan diselenggarakannya forum.

Pengaturan mekanisme pembahasan dan alokasi waktu akan bermanfaat mengarahkan pembahasan agar fokus pada topik yang ditetapkan dan menjaga disiplin waktu.

e. Mengalokasikan waktu;

Waktu merupakan sumber daya yang sangat terbatas dan tak terbarukan. Disiplin terhadap jadwal yang disediakan akan menghindari terlambatnya acara-acara berikutnya. Keterlambatan kehadiran atau terlambatnya suatu acara, berdampak langsung pada persepsi publik terhadap Anggota DPR.



Upayakan untuk memulai acara sesuai jadwal, agar tidak justru menghukum tamu/mitra kerja yang datang tepat waktu. Demikian pula, akhiri acara sesuai jadwal, agar peserta dapat melanjutkan pekerjaan dan tugas mereka yang lain.

Dalam menyusun jadwal, pertimbangkan jarak dan kondisi jalan dari suatu acara ke lokasi acara berikutnya. Sediakan waktu perjalanan yang realistis agar perjalanan lebih nyaman. Waktu yang tersedia selama perjalanan dapat dimanfaatkan Anggota DPR untuk koordinasi dengan staf, mempersiapkan diri dengan membaca bahan-bahan relevan, atau beristirahat agar penampilan Anggota DPR lebih bugar saat menghadiri acara berikutnya.

f. Menyiapkan Logistik;

Peran logistik berdampak langsung terhadap kelancaran, sukses dan kesan mitra kerja terhadap Anggota DPR. Walau sekilas terkesan sederhana, sektor logistik mencakup bidang luas dan pekerjaan yang rumit, seperti:

Transportasi;

Mencakup transportasi untuk Anggota DPR, staf, relawan maupun mitra kerja, dari Jakarta ke Dapil dan sebaliknya, serta transportasi selama kunjungan. Pastikan bahwa moda dan anggaran transportasi yang disediakan cukup realistis dan layak. Keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketepatan waktu merupakan prioritas utama.

Akomodasi, Ruang Pertemuan;

Akomodasi yang layak perlu disiapkan bagi Anggota DPR beserta Tim dan para mitra kerja/narasumber yang diundang, terutama jika melibatkan pihak-pihak yang berdomisili jauh dari tempat penyelenggaraan sedangkan acara dimulai pada pagi hari dan/atau diperkirakan selesai pada malam hari.

Ruang untuk transit/istirahat dan sholat juga perlu disediakan untuk menjaga kesegaran fisik dan bathin semua peserta kunjungan.



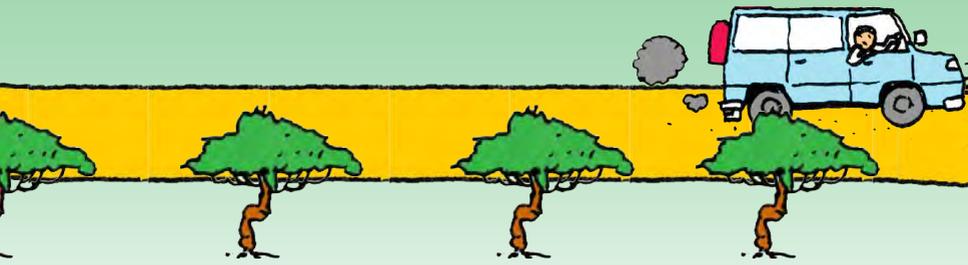
Penggandaan dokumen;

Bahan cetakan dalam jumlah banyak, dapat menjadi beban jika dibawa dari Jakarta. Sebagai alternatif, dapat disiapkan *master copy* atau *soft copy* dokumen untuk digandakan di Dapil atau lokasi kegiatan. Namun sebelumnya, pastikan bahwa alat dan layanan penggandaan dokumen di Dapil tersedia dan memenuhi syarat mutu.

Peralatan rapat;

Peralatan rapat seperti proyektor, papan tulis, dan alat tulis perlu disiapkan sesuai dengan kebutuhan.





Konsumsi;

Konsumsi tidak hanya untuk kegiatan rapat. Konsumsi selama perjalanan perlu diperhatikan. Terutama air minum bagi semua peserta. Buah-buahan segar yang tidak mudah layu dan tidak berbau menyengat, bermanfaat sebagai makanan yang dapat dikonsumsi setiap saat dalam perjalanan. Perhatikan juga jadwal istirahat makan bagi seluruh peserta kunjungan.

Terlambat makan tidak hanya berpotensi mengganggu kesehatan, namun rasa lapar juga berpengaruh langsung terhadap mood peserta. Ingat pepatah yang berbunyi "**A hungry man is an angry man**" (orang yang lapar adalah orang yang marah).

Sarana Penunjang;

Pastikan aspek teknis seperti **sound system, genset, teleconference**, pasokan listrik, proyektor dsb dalam kondisi operasional dan siap pakai, sebelum acara dimulai. Akan mengganggu, bahkan memalukan, jika ternyata sarana penunjang belum siap tatkala para undangan sudah hadir. Pertemuan yang semula diharapkan memperkuat persepsi positif, dapat berbalik justru merugikan citra Anggota DPR.

Untuk menghindari terganggunya kelancaran acara, akan lebih baik jika disiapkan cadangan apabila peralatan yang ada mengalami gangguan. Demikian pula keberadaan teknisi yang handal ditempat kegiatan dibutuhkan untuk memastikan semua peralatan berfungsi sebagaimana mestinya.

Atribut;

Atribut seperti spanduk, baliho, identitas panitia atau peserta (seragam, pin, pita, topi, **name tag**), perlu disesuaikan dengan sifat kegiatan. Pada kegiatan yang dibiayai DPR dan diselenggarakan sebagai anggota DPR, sebaiknya atribut mencantumkan lambang DPR serta tidak mencantumkan lambang partai. Demikian pula sebaliknya.



Kesehatan;

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) diperlukan untuk menghadapi situasi darurat, misalnya peserta yang mendadak pingsan atau mengalami kecelakaan. Pertolongan pertama yang efektif akan menyelamatkan nyawa penderita/korban.

Selain obat-obatan, keberadaan tenaga medis serta kerja sama dengan Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat sebagai rujukan, akan bermanfaat dalam menghadapi kondisi darurat.

Keamanan;

Setiap kegiatan yang melibatkan massa, berpotensi mengalami keributan. Prosedur pengamanan diperlukan sebagai antisipasi agar kegiatan tidak berubah menjadi bencana saat terjadi suatu gangguan. Sebagai contoh, niat baik Bupati Nabire menggelar “Kejuaraan Tinju Piala Bupati” pada bulan Juli 2013, berubah jadi bencana tatkala pecah pertikaian antar pendukung. Akibatnya 17 orang tewas dan 30 lebih cedera parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Anggota DPR perlu mengantisipasi hal serupa untuk kegiatan di Dapil yang melibatkan massa.

g. Organisasi Tim Kerja;

Tim Jakarta;

Tim Jakarta terdiri dari staf yang sehari-hari membantu Anggota DPR di Jakarta. Mereka berperan besar di Kesekretariatan terutama dalam fase Perencanaan dan Persiapan. Selama kunjungan, tim ini juga dapat mendampingi Anggota DPR untuk memperkuat Tim Lokal, terutama terkait koordinasi dan kendali tentang alokasi waktu, anggaran dan sebagainya. Sebagian anggota tim disarankan berangkat lebih awal ke Dapil sebagai tim *Advance*, guna mengkoordinir persiapan dengan Tim Lokal.



Tim Jakarta juga bertanggungjawab membantu Anggota DPR dalam tindaklanjut serta menyusun laporan pasca kunjungan.

Tim Lokal;

Tim Lokal terdiri dari staf dan relawan yang sehari-hari berada di Dapil. Tim ini wajib memantau dan melaporkan kondisi terkini kepada Anggota DPR. Selain itu, tim juga bertugas menghubungi para mitra kerja serta instansi terkait, agar kunjungan Anggota DPR lancar serta produktif.

Aspek teknis serta perijinan setempat untuk acara dan kegiatan di Dapil juga menjadi tanggungjawab Tim Lokal.

Konsultan/Pakar;

Permasalahan di Dapil sangat beragam dan tidak mungkin semuanya dalam lingkup keahlian Anggota DPR. Jasa pakar atau konsultan patut dipertimbangkan untuk membantu Anggota DPR mendapat pemahaman yang lebih mendalam serta menjajagi berbagai alternatif solusi.

Pakar/Konsultan (mungkin juga simpatisan partai) yang paham tentang kebijakan publik, akan mampu memberikan pertimbangan lain yang bersifat non-teknis, seperti implikasi kebijakan, anggaran dan dampak sosial.

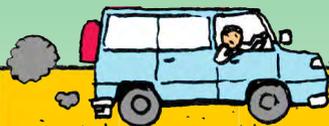
Organisasi Masyarakat;

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) biasanya mempunyai perhatian, keahlian dan informasi mendalam terhadap bidang yang ditekuni. Pendapat mereka sering mempunyai otoritas sosial yang cukup tinggi.

Umumnya, OMS bersifat netral, tidak berafiliasi politik. Mereka terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun yang menunjukkan minat dan perhatian terhadap bidang mereka. Walau demikian, kebanyakan OMS sangat selektif dalam interaksi dengan politisi.

Anggota DPR perlu membangun hubungan berazas saling menghormati, saling membutuhkan, saling memberi manfaat untuk menjalin kerja sama dengan mereka. Jangan pernah menyalahgunakan informasi dan kepercayaan mereka. Sekali saja dikhianati, mereka berpotensi menjadi musuh terbesar Anggota DPR.





Perwakilan Eksekutif;

Dalam rangka mengatasi permasalahan, wewenang Anggota DPR terbatas pada memberi saran, dukungan/tekanan politik. Pada umumnya, eksekusi solusi merupakan ranah kerja eksekutif. Untuk mempercepat proses penanggulangan suatu kondisi yang mendesak, Anggota DPR perlu berkoordinasi dengan mitra kerjanya (pejabat Kementerian) atau pemerintah daerah dalam kunjungan ke Dapil.



Perlu diperhatikan bahwa hukum melarang Anggota DPR menerima pembiayaan dari mitra kerjanya.

Apabila harus melakukan kunjungan bersama, pastikan agar masing-masing pihak bertanggungjawab atas kewajiban pembiayaan dirinya sendiri

Kader Partai;

Kader partai merupakan ujung tombak partai yang menghadapi kondisi di akar rumput sehari-hari sepanjang tahun. Mereka perlu selalu diberi informasi terkini tentang kebijakan, sikap dan dinamika politik di Senayan yang relevan bagi Dapil.

Melibatkan kader partai dalam kegiatan tertentu, merupakan apresiasi terhadap keberadaan mereka sekaligus melatih mereka menjadi politisi yang peka, tanggap dan akuntabel terhadap konstituen. Dalam pemilihan umum mendatang, mereka berpotensi menjadi pendukung utama dan relawan Anggota DPR.

h. Sekretariat;

Sekretariat yang efektif mutlak dibutuhkan guna mendukung kelancaran dan produktifitas hubungan Anggota DPR dengan konstituennya, termasuk kunjungan ke Dapil. Disinilah informasi, bahan rujukan, komunikasi, arus keuangan, logistik dan koordinasi berbagai kegiatan diolah, dimatangkan dan disiapkan untuk kepentingan Anggota DPR.



Keterampilan dan komitmen staf sekretariat akan menentukan apakah mereka akan menjadi instrumen penunjang atau justru menjadi beban Anggota DPR. Selain kewenangan yang memadai, diperlukan keterbukaan dan kelancaran komunikasi antara staf sekretariat dengan Anggota DPR. Akan lebih baik jika secara berkelanjutan staf sekretariat diikuti program pelatihan peningkatan keterampilan profesi.

Kegiatan utama sekretariat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Penyediaan informasi & bahan rujukan;
- Koordinasi & Penjadwalan;
- Perijinan;
- Korespondensi;
- Dokumentasi;
- Pengarsipan;
- Keuangan dan
- Pelaporan;



3. Pelaksanaan

a. Penyampaian Undangan;

Undangan sebaiknya disampaikan minimal lima hari sebelum kegiatan, dan ditindaklanjuti staf dengan menghubungi para undangan untuk memastikan kehadiran mereka. Khusus untuk narasumber, tokoh dan mitra kerja yang diundang, akan lebih baik jika Anggota DPR secara pribadi menghubungi mereka untuk menyampaikan permohonan partisipasi aktif mereka dalam acara yang disiapkan.

b. Persiapan tempat & sarana;

Staf lokal perlu memastikan bahwa tempat yang akan digunakan untuk acara sudah mendapat ijin dari pemilik/ pengelola untuk digunakan menyelenggarakan acara yang direncanakan. Demikian pula pemberitahuan kepada dan/atau perijinan dari Kepolisian dan Pemerintah setempat juga harus diselesaikan minimal 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

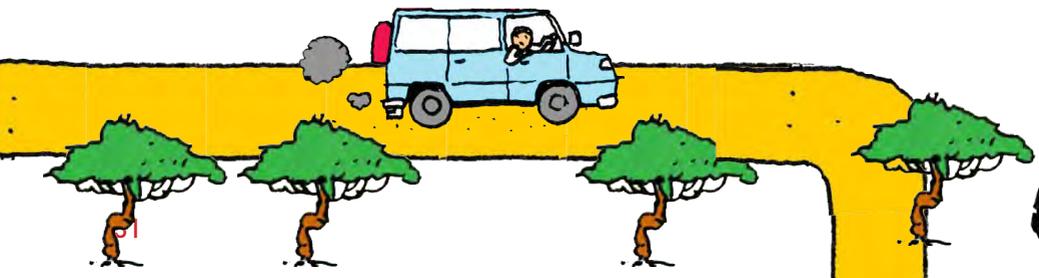


Pastikan bahwa sarana seperti tenda, meja, kursi, **soundsystem**, **genset** telah terpasang dan berfungsi baik beberapa jam sebelum tamu pertama diperkirakan tiba. Akan menimbulkan kesan kurang baik jika pengerjaan masih berlangsung setelah tamu mulai berdatangan.

Penting pula memastikan pembayaran uang muka untuk sewa tempat maupun sarana terlaksana sebagaimana mestinya, agar tidak menjadi masalah memalukan yang timbul ketika acara berlangsung.

c. Penampilan pribadi & etika pergaulan lokal;

Dalam menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih erat dengan konstituen, Anggota DPR menghadapi tantangan sekat sosial. Berpakaian resmi/mewah serta gaya bahasa formal dan kaku terbukti menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan wakilnya. Pemahaman tentang nilai-nilai, tradisi, kebiasaan setempat dan bahasa daerah merupakan modal penting bagi Anggota DPR, terutama yang bukan putra daerah, untuk menjalin keakraban dengan warga di Dapil.



Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkenal dengan gaya "Blusukan" dimana dia menanggalkan formalitas dan protokoler; untuk mendatangi, menyapa dan bersentuhan dengan warganya. Pendekatan ini disambut hangat oleh warga yang sudah jenuh dan bosan dengan gaya formal, atau bahkan feodal. Dengan "Blusukan" Gubernur Joko Widodo terbukti mampu menerapkan kebijakan tidak populis tanpa menimbulkan gejolak dan perlawanan berarti dari subyek.

Anggota DPR tidak perlu khawatir kehilangan wibawa jika melakukan pendekatan informal dengan konstituen. Justru sebaliknya, warga lebih menghormati pejabat negara yang tampil bersahaja dan akrab dengan gaya hidup rakyat jelata sehari-hari. Kewibawaan akan tetap terjaga apabila Anggota DPR mampu mempengaruhi kebijakan dan anggaran negara untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan konstituennya.

d. Bahasa lisan, bahasa tubuh dan bahasa daerah;

Bahasa menunjukkan bangsa, demikian pepatah. Tutur kata dan tata bahasa menunjukkan kualitas seseorang, namun bukan berarti Anggota DPR perlu menggunakan terminologi canggih ketika berkomunikasi dengan konstituen. Penggunaan kata-kata yang maknanya mudah dipahami awam, justru lebih efektif dalam menjalin komunikasi dengan konstituen.

Menjelaskan proses APBN atau Legislasi yang rumit di DPR dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami konstituen, serta disampaikan secara singkat dan menarik, merupakan contoh tantangan yang sering dihadapi Anggota DPR ketika bertemu dengan warga.



Dalam komunikasi tatap muka, disamping tutur kata, gerakan tubuh juga berperan penting. Mimik wajah yang serius namun tetap dihiasi senyum, sigap menjabat tangan mitra bicara, postur tubuh dan sebagainya dapat memperkuat kesan bahwa Anggota DPR serius mendengarkan namun tetap bersikap bersahabat terhadap warga yang diwakilinya.

Penggunaan bahasa daerah sangat bermanfaat meningkatkan keakraban dan kelancaran komunikasi dengan konstituen. Akan sangat baik jika Anggota DPR mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah, minimal beberapa kalimat untuk membuka diskusi agar suasana menjadi cair.

e. Manajemen waktu;

Waktu yang tersedia untuk kunjungan ke Dapil pada umumnya sangat singkat, sedangkan banyak pihak yang perlu ditemui dan acara yang perlu dilaksanakan. Staf perlu membantu Anggota DPR menyusun skala prioritas agar waktu kunjungan produktif.



Forum diskusi perlu dialokasikan waktu yang lebih banyak agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan para peserta mendapat kesempatan menyampaikan pendapat, gagasan dan permasalahan. Anggota DPR sebaiknya mengikuti pembahasan dari awal hingga tuntas, serta tetap disiplin dalam memulai dan mengakhiri forum, agar pembahasan tetap fokus dan peserta tidak jenuh.

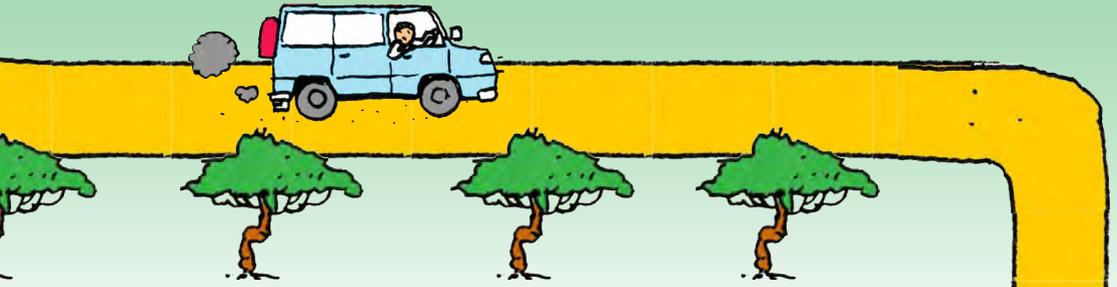
Untuk acara yang ringan seperti menghadiri pergelaran seni atau pertandingan olahraga, kehadiran Anggota DPR cukup untuk menghormati tuan rumah dan tidak wajib mengikuti hingga akhir acara.

Dalam menyusun jadwal dan acara, perlu diperhatikan untuk menyediakan jeda istirahat bagi Anggota DPR guna menyegarkan kembali fisik dan pikirannya. Penampilan Anggota DPR dengan wajah kusut akan memberikan kesan yang kurang baik. Demikian pula jika Anggota DPR terlalu lelah, kemungkinan emosinya akan terganggu dan kemampuannya berdiskusi akan menurun.

f. Kerja sama dengan DPRD, media, lembaga dan kelompok lokal;

Banyak permasalahan di Dapil yang bukan ranah kebijakan nasional dan lebih tepat direspon oleh pejabat maupun pemangku kepentingan di daerah. Untuk efisiensi waktu serta efektifitas kerja, Anggota





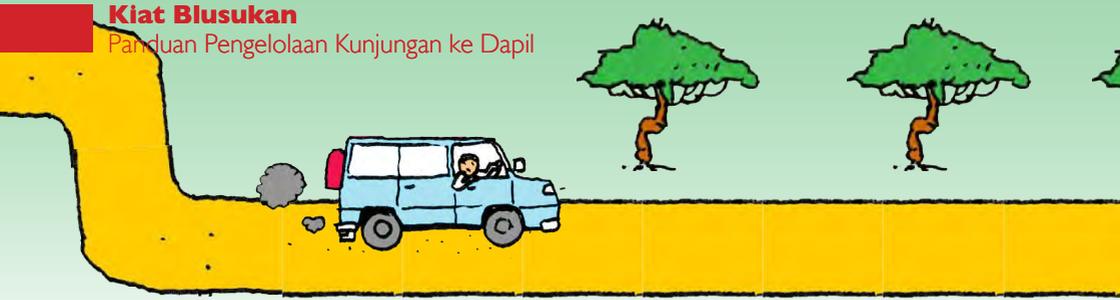
DPR dapat mengajak Anggota DPRD setempat (diutamakan dari partai yang sama) selama kunjungan ke Dapil. Dengan demikian lingkup permasalahan yang dapat ditanggulangi akan lebih luas dan prosesnya lebih cepat.

Bilamana memungkinkan, Anggota DPR dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau kelompok setempat sebagai mitra kerja untuk mengatasi permasalahan di Dapil. Mereka dapat membantu Anggota DPR melakukan pemantauan atau melaksanakan program di Dapil secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada saat kunjungan.

g. Notulensi & dokumentasi;

Semua forum rapat dan diskusi sebaiknya direkam dan dibuat notulensi agar dapat menjadi dokumen pendukung tindaklanjut. Untuk acara lain, seperti kunjungan silaturahmi, staf cukup mencatat permasalahan dan aspirasi yang disampaikan konstituen serta solusi dan/atau janji yang disampaikan Anggota DPR. Notulensi akan bermanfaat sebagai rujukan ketika menyampaikan laporan dan melakukan tindaklanjut. Dokumentasi lain berupa foto dan/atau video juga bermanfaat untuk memperkuat laporan dan diunggah ke akun media sosial Anggota DPR.





h. Survei & kuesioner;



Kunjungan ke Dapil dapat dimanfaatkan untuk menjangkau pendapat atau sikap konstituen terhadap suatu permasalahan. Rancanglah survei sederhana yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan atau perumusan sikap politik terhadap isu terkait.

Dalam survei, kualitas pertanyaan akan menentukan kualitas jawaban dari responden. Demikian pula jumlah dan kualitas responden akan sangat mempengaruhi hasil survei. Survei sebaiknya dirancang dan dilaksanakan oleh pihak yang terlatih. Anggota DPR dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di Dapil atau lembaga survei.

i. Tips praktis;

Beberapa hal kecil yang dapat membuat kunjungan ke Dapil lebih berkesan, efektif dan menyenangkan, adalah:

- Bawalah sebanyak mungkin kartu nama untuk dibagikan di Dapil. Seperti halnya foto, masyarakat pada umumnya bangga mempunyai kartu nama Anggota DPR karena merasa mempunyai kedekatan pribadi;
- Membawa cendera mata. Ketika berkunjung sebagai tamu, tuan rumah akan merasa sangat terhormat bila Anggota DPR memberi cendera mata, bernuansa khas DPR, seperti pena atau tas atau topi berlambang DPR;
- Foto bersama. Ajaklah tuan rumah, tamu undangan, mitra diskusi atau anggota masyarakat yang ditemui untuk foto bersama dan





mintalah nama serta alamat mereka agar dapat dikirim foto tersebut. Umumnya masyarakat bangga dapat berfoto bersama Anggota DPR dan akan memajang foto tersebut di ruang tamu rumahnya;

- Mencoba makanan khas daerah. Bila memungkinkan, Anggota DPR perlu mencoba makanan khas atau yang terkenal di Dapil. Jangan ragu untuk masuk ke warung atau bahkan makan di kaki lima, bersama dengan warga masyarakat. Inilah salah satu kiat “Blusukan” yang disukai rakyat dan juga akan menjadi “*Photo Moment*” yang layak menjadi berita di media lokal.

Untuk menjaga kredibilitas, Anggota DPR perlu menghindari hal-hal sebagai berikut:

- Meninggalkan hutang atau biaya-biaya yang belum terbayar. Sebelum meninggalkan Dapil, mintalah staf untuk melaporkan aspek keuangan setiap acara selama kunjungan dan pastikan bahwa semua biaya yang menjadi tanggungjawab Anggota DPR telah dilunasi.
- Menjanjikan solusi atau bantuan yang jelas diluar kewenangan dan/ atau kemampuan Anggota DPR. Sebagai alternatif, Anggota DPR dapat menawarkan untuk menyampaikan kepada instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan, namun jangan menjanjikan atau menjamin bahwa instansi atau pejabat tersebut akan merespon secara positif dan cepat.

Apabila Anggota DPR menghadapi permintaan atau aspirasi yang jelas bertentangan dengan kewenangan atau sikap politik Anggota DPR, sebaiknya Anggota DPR secara jujur, jelas dan tegas, namun tetap santun, menyampaikan penolakan. Jika memungkinkan, Anggota DPR juga dapat menawarkan solusi alternatif kepada konstituen.

4. Pemanfaatan Media Sosial

Pertumbuhan media sosial merupakan fenomena yang tidak terbendung. Berdasarkan statistik, penggunaan telepon seluler di Indonesia sudah bergeser dari komunikasi suara dan SMS sekarang menjadi sarana akses media sosial dan pencarian informasi melalui internet. Pengguna media sosial di Indonesia tergolong peringkat teratas/jumlahnya diantara terbesar didunia. Terutama untuk media sosial Twitter dan Facebook.

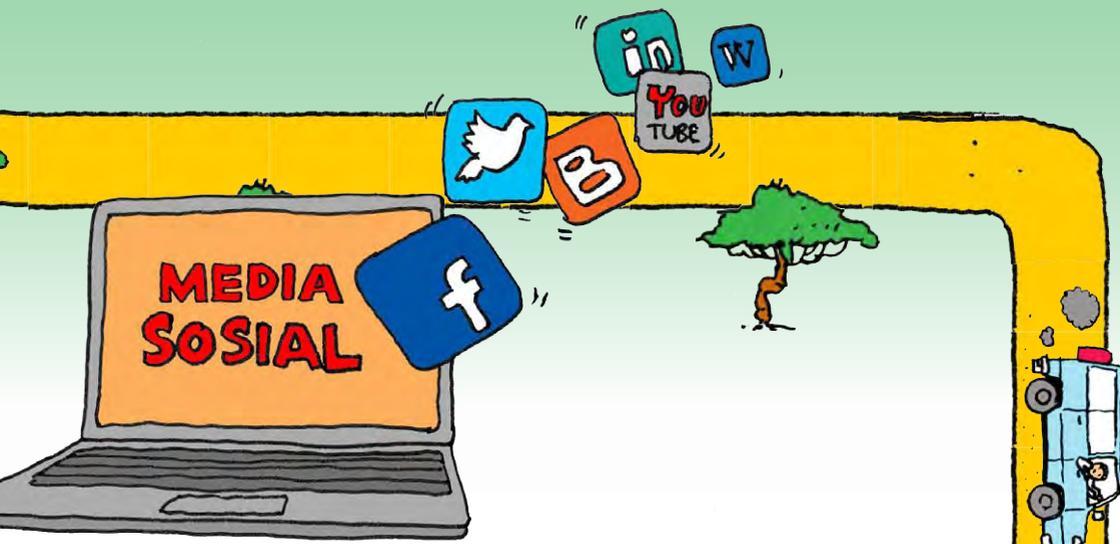
Pengaruh media sosial cukup signifikan. Topik yang berkembang menjadi pembahasan luas di media sosial dipantau oleh media-media utama untuk menentukan isu apa yang diangkat. Media sosial juga digambarkan sebagai jalur komunikasi yang terbuka, egaliter dan independen.

Sebagai pejabat publik, Anggota DPR wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi ini untuk memperkuat interaksinya dengan konstituen. Tak ada pilihan bagi Anggota DPR, kecuali perlu mengenal dan memanfaatkan media sosial.

Prinsip dasar komunikasi melalui media sosial adalah *it's not about me*, minimal *it's about us*, dan yang paling ideal adalah *it's about you*. Itu merupakan prinsip yang perlu selalu diingat Anggota DPR agar eksis dan sukses berinteraksi di media sosial.

a. Kenali perilaku tiap kelompok konstituen di media Sosial;

Sebagaimana berkomunikasi umumnya, pemanfaatan media sosial harus diawali dengan mengenali secara spesifik sasaran audiens di media sosial. Siapa dan bagaimana karakteristik mereka, pola, kebiasaan, gaya serta perilaku mereka di media sosial. Melalui data sekunder, tidak sulit mendapatkan informasi tentang berapa banyak pengguna media sosial tertentu serta pola aktivitas mereka di Dapil. Informasi ini penting untuk merumuskan gaya bahasa, cara penyampaian serta jenis media sosial yang paling tepat untuk menjangkau kelompok audiens sasaran.



Mengingat bahwa akses media sosial tergantung pada kualitas jaringan internet, maka Anggota DPR perlu menggali informasi tentang kualitas layanan internet di Dapil.

b. Informasi yang perlu & patut disampaikan;

Perencanaan sistematis tentang pesan-pesan yang perlu disampaikan melalui media sosial akan bermanfaat membangun komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, serta tidak terganggu distorsi pemakai media sosial lain yang dapat mengaburkan pesan utama yang ingin disampaikan. Informasi normatif yang berhubungan dengan kegiatan kedewanan, fraksi, partai, kunjungan ke Dapil, bahkan kegiatan pribadi seperti hobi dapat disampaikan kepada publik melalui media sosial. Informasi tersebut dapat merespon kebutuhan publik tentang aktifitas Anggota DPR dan perkembangan di Senayan.

Informasi spesifik mengenai proses dan perkembangan suatu pembahasan RUU atau Rapat Dengar Pendapat (yang tidak bersifat rahasia) patut disebarluaskan melalui media sosial, sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik. Perlu diperhatikan bahwa media utama (*mainstream*) memantau akun-akun para tokoh, sebagai bahan rujukan dalam menentukan berita.

c. Manajemen Media Sosial

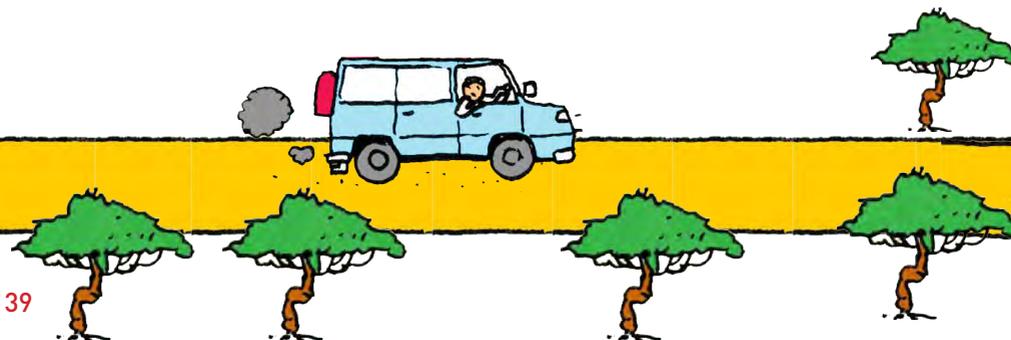
Penggunaan media sosial terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Politisi yang tidak hadir di media sosial terkesan ketinggalan zaman dan konvensional. Sedemikian kuatnya pengaruh media sosial sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu untuk mempunyai akun resmi media sosial di Twitter, Facebook, YouTube dan Instagram.

Kegiatan di media sosial dapat menyita waktu dan perhatian serta berpotensi menjadi adiktif. Padatnya jadwal anggota DPR menjadi kendala untuk 'bermain' di ranah media sosial. Untuk mengatasi itu, Anggota DPR dapat membentuk tim yang mengelola komunikasi di media sosial. Tim yang lazim disebut 'admin' ini bertugas mengoperasikan akun media sosial Anggota DPR dengan melakukan **update** serta berinteraksi pengguna lain. Admin umumnya terdiri dari staf, atau pihak ketiga/konsultan yang ditunjuk. Keberadaan Admin tidak menghalangi Anggota DPR untuk berinteraksi langsung di saat senggang.

Admin perlu diberi arahan dan batasan yang jelas tentang informasi yang boleh dan patut disampaikan di media sosial. Agar karakter Anggota DPR tercermin, Admin perlu memahami gaya bahasa, keahlian dan sikap politik serta beberapa informasi pribadi Anggota DPR. Anggota DPR menanggapi langsung pertanyaan atau bahasan yang di luar normatif.

d. Menjaring informasi dan mengukur respon publik;

Anggota DPR dapat menggulirkan pembahasan di media sosial tentang suatu topik yang sedang atau akan di bahas di DPR untuk menjaring informasi atau opini publik.



Misal: "Pendapat saya mengenai RUU X adalah Saya menilai manfaat RUU X adalah, sedangkan kelemahan/kekurangan RUU X adalah..... Bagaimana pendapat teman-teman?"

Atau, "Pekan depan saya akan rapat kerja dengan Kementerian A membahas mengenaiApakah ada permasalahan di Dapil yang perlu saya pertanyakan atau saya perjuangkan dalam rapat tersebut?"

Menjaring informasi di media sosial tidak terbatas dengan menyampaikan atau melempar sebuah isu atau pertanyaan, tapi dapat juga dengan mencermati dinamika umum yang berkembang di media sosial, atau dengan menyimak lini masa (*time line*) para tokoh atau pakar.

Survei mini juga dapat dilakukan melalui media sosial untuk mengukur respon publik terhadap suatu wacana, isu, sikap, atau kebijakan. Apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik, respon publik di media sosial dapat menjadi sampel yang valid.

Tanggapan dan pendapat di media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kunjungan ke Dapil.



e. Membentuk opini;

Isu-isu besar, permasalahan, atau pernyataan tokoh di media sosial dapat mempengaruhi opini publik. Topik yang ramai dibahas sering menjadi rujukan media berita.

f. Menggalang dukungan;

Jika dikelola dengan baik, interaksi yang terjalin di media sosial dapat membentuk kedekatan emosional dengan banyak pengguna. Dukungan yang terbangun di media sosial dapat dilanjutkan menjadi dukungan di dunia nyata. Kasus Prita Mulyasari merupakan contoh nyata bagaimana solidaritas di media sosial dapat ditransformasi menjadi dukungan riil



berupa pengumpulan “Koin Untuk Prita” dan terus berkembang menjadi tekanan publik baik kepada pihak-pihak yang bertikai maupun terhadap proses peradilan,

g. Konsekuensi aktifitas di media sosial;

Untuk beraktifitas di media sosial yang egaliter, Anggota DPR perlu memiliki, kesiapan mental. Dalam interaksi di media sosial, tidak ada pembedaan status sosial, ekonomi dsb. Semua pengguna media sosial berdiri sama tinggi. Tata bahasa yang digunakan juga sangat informal, lugas dan terkadang vulgar. Kesiapan mental merupakan kebutuhan utama, karena tak jarang ada kritik, serangan, fitnah dan bahkan sumpah serapah terjadi dalam interaksi.

Sebagai pengguna media sosial Anggota perlu berpikiran terbuka (*open minded*) dan menghargai pendapat orang lain, siap menerima perspektif dari sudut pandang lain, bahkan yang ekstrim sekalipun. Dengan pikiran yang terbuka akan semakin banyak masukan yang diterima.

5. Bekerja Sama dengan Media

Media sebagai sumber informasi dan berita dapat digolongkan menjadi dua kategori:

- Media Konvensional - mencakup televisi, surat kabar, majalah, radio, dsb.
- **New Media** - merupakan media yang memanfaatkan jaringan internet, mencakup portal berita **online**, media sosial, **search engine**, **website** personal maupun **website** organisasi, dsb.

Anggota DPR perlu bekerja sama dengan media di Dapil. Selain bermanfaat memberitakan tentang kegiatan dan informasi yang perlu disampaikan kepada publik, media juga dapat menjadi sumber informasi yang handal





tentang kondisi terkini di Dapil. Media di Dapil merupakan mitra kerja strategis untuk membantu menyebarkan informasi pra, selama dan pasca kunjungan berlangsung. Pemberitaan di media juga berfungsi sebagai “laporan” Anggota DPR kepada konstituen di Dapil.

Tidak semua media cocok dan perlu diajak bekerja sama. Anggota DPR perlu mengidentifikasi berbagai media yang berpengaruh di Dapil, dan menjalin kerja sama dengan pimpinan redaksi media tersebut. Pada umumnya media lokal menyambut baik kerja sama dengan anggota DPR karena mereka sering membutuhkan pasokan informasi yang handal tentang berbagai perkembangan kebijakan dan dinamika politik. Sebaliknya Anggota DPR dapat memanfaatkan pasokan informasi dari media lokal untuk dapat terus memantau perkembangan dinamika sosial, politik dan ekonomi di Dapil.

Bentuk pertemuan dengan media lokal dapat berupa kunjungan ke kantor redaksi atau penyelenggaraan jumpa pers.

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam menjalin kerja sama dengan media konvensional maupun new media, adalah:

- Jangkauan – Cermati jumlah audiens (pembaca, pemirsa atau pendengar) yang dijangkau oleh media tersebut, serta sebaran geografis dan demografi audiens;
- Karakteristik – Media dapat dipilah berdasarkan Konten maupun Audiensnya. Berdasarkan konten, ada media berita, *lifestyle* dan spesialis bidang tertentu. Berdasar audiens, media dapat diperuntukkan untuk kelompok gender, minat khusus (misal penggemar otomotif atau bola), kelompok usia dan sebagainya;

- Mekanisme kerja Redaksi dan tenggat waktu (*deadline*) – Penting untuk mengetahui waktu naik cetak atau jadwal tayang agar Anggota DPR dapat menyesuaikan jadwal konferensi pers atau kegiatan yang dapat diliput media. Kegiatan yang dilaksanakan melampaui *deadline*, akan disimpan untuk dipertimbangkan dimuat atau disiarkan pada siklus berikutnya. Jika dalam proses itu terjadi peristiwa atau berita-berita lain yang lebih segar dan penting, *stetmen* atau acara Anggota DPR akan tersisih, tidak mendapatkan ruang atau *slot* waktu.
- Prinsip bekerja sama – Selama ini ada anggapan bahwa agar diberitakan, Anggota DPR perlu menyediakan dana untuk reporter. Anggapan itu tidak benar. Selain diatur oleh kode etik jurnalistik, para wartawan/reporter selalu membutuhkan informasi baru dan signifikan untuk dijadikan berita. Mereka juga membutuhkan dokumen pendukung. Apabila Anggota DPR dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka besar kemungkinan dirinya akan menjadi nara sumber pemberitaan. Prinsip kerja sama dengan media adalah saling membutuhkan, saling menghormati dan saling mempercayai serta menjaga kepercayaan;
- Untuk meningkatkan kualitas kerja sama, Anggota DPR perlu menyempatkan diri berkunjung ke kantor redaksi media utama di Dapil. Para redaktur tentu akan antusias bertukar informasi dengan Anggota DPR. Biasanya, kunjungan tersebut juga akan diberitakan.

6. Interaksi dengan media

Dalam bekerja sama dengan media, kegiatan operasional pada umumnya mencakup:

a. Pemberitaan:

Pemberitaan adalah pelaporan atas suatu peristiwa oleh media. Konten pemberitaan sepenuhnya dikendalikan oleh media. Nara sumber tidak berhak untuk mengatur konten berita maupun kapan berita tersebut akan disampaikan.





Sangat mungkin terjadi Anggota DPR diwawancarai tentang suatu masalah, namun ternyata hasil wawancara tidak dimuat dalam pemberitaan media tersebut. Hal ini, antara lain, mungkin disebabkan:



- Informasi yang didapat dari narasumber tidak ada yang baru atau kurang relevan;
- Ada narasumber lain yang memberikan informasi lebih lengkap, akurat atau menarik;
- Informasi nara sumber tidak sesuai dengan arah pemberitaan media tersebut;
- Muncul peristiwa atau perkembangan baru yang membuat topik wawancara menjadi tidak relevan lagi.

b. Wawancara eksklusif:

Wawancara antara satu media dengan narasumber tertentu. Tidak ada media lain yang hadir dalam wawancara tersebut, sehingga hanya media yang melakukan wawancara yang mempunyai materi tentang topik tersebut dari nara sumber terkait.



Eksklusifitas merupakan aspek yang sangat penting bagi media karena berdampak langsung pada daya saing media tersebut. Nara sumber diharapkan ikut menjaga sifat eksklusif sebuah berita dengan tidak membahas topik yang sama dengan media lain, sebelum hasil wawancara dimuat oleh media yang pertama.

Tidak jarang terjadi, setelah hasil wawancara dimuat oleh media pertama, topik menjadi perhatian kalangan yang luas dan banyak media yang ingin memuat pendapat datau informasi lebih lanjut dari nara sumber yang sama. Saat itu nara sumber tidak lagi terikat eksklusifitas media pertama karena topik tersebut sudah menjadi ranah publik. Namun biasanya, media yang mengawali pemberitaan akan terus mendalami dan mengembangkan topik tersebut dan nara sumber awal juga akan menjadi nara sumber utama terkait topik atau peristiwa terkait.

c. *Talk shows /Diskusi:*

Talk Show merupakan forum pembahasan mengenai suatu topik atau tokoh. Dalam pembahasan tentang suatu masalah, dapat dihadirkan hanya satu atau beberapa nara sumber dengan keahlian yang berbeda terkait topik sehingga tidak bertentangan, namun justru saling melengkapi. *Talk Show* biasanya menguraikan secara mendalam suatu permasalahan.

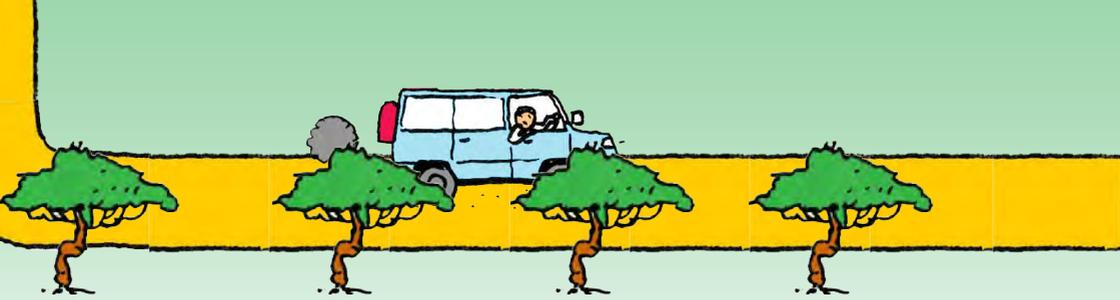
Talk show juga dapat bersifat memperkenalkan profil nara sumber sebagai seorang tokoh agar publik lebih mengenalnya secara lebih lengkap atau mengenali hal-hal yang selama ini tidak terungkap kepada publik.



d. *Debat:*

Acara diskusi atau debat yang diselenggarakan oleh media, biasanya oleh televisi atau radio, akan menghadirkan sedikitnya dua nara sumber yang berbeda pendapat tentang suatu topik. Tujuan debat adalah untuk mengungkap argumentasi pro-kontra agar pendengar atau penonton mendapatkan informasi berimbang tentang suatu permasalahan. Pemandu acara akan





melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan juga mengatur arah pembahasan serta alokasi waktu.

Pada acara debat, misi utama para nara sumber bukanlah untuk memenangkan perdebatan atau mempermalukan lawan bicaranya, namun meyakinkan pendengar atau penonton, akan kebenaran informasi atau sikap politik atau kebaikan solusi yang dia sampaikan.

e. Iklan:

Iklan merupakan informasi berbayar yang dapat dimuat oleh media. Berbeda dengan pemberitaan, konten informasi dan jadwal iklan dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Meski demikian, media juga berhak menolak memuat iklan tertentu apabila kontennya bertentangan dengan perundangan yang berlaku atau dengan norma dan nilai-nilai masyarakat setempat.



Selain iklan *Display* (teks, gambar, video), Anggota DPR dapat juga memanfaatkan Advertorial yaitu iklan yang berbentuk pemberitaan atau artikel yang disponsori, untuk menyampaikan informasi kepada publik. Pemasang iklan perlu memahami batas waktu memasukkan materi, bentuk materi serta biaya yang harus dibayar.

Perlu diperhatikan bahwa pemasangan iklan tidak akan mempengaruhi pemberitaan media tertentu karena Redaksi bersifat independen dan tidak terkait dengan aspek bisnis (iklan) media tersebut.

f. Konferensi Pers:

Konferensi Pers merupakan forum bagi suatu lembaga atau nara sumber menyampaikan berita atau pernyataan kepada beberapa media yang



diundang. Tujuan Konferensi Pers adalah untuk mempercepat penyampaian berita secara meluas sekaligus kepada banyak media, serta memastikan bahwa semua media mendapat bahan informasi yang sama.

Materi konferensi pers bersifat informasi yang, mungkin, layak menjadi berita. Bukan iklan. Dengan demikian, media yang hadir tidak berkewajiban memuat informasi yang disampaikan dalam konferensi pers, apabila dinilai tidak mempunyai atau rendah nilai beritanya (*news value*)

Agar materi yang disampaikan dalam konferensi pers dapat dimuat oleh media, pastikan bahwa:

- Informasi yang disampaikan mengandung suatu perkembangan terbaru, signifikan dan bermanfaat bagi khalayak luas;
- Konferensi Pers dilaksanakan pada waktu yang memungkinkan bagi reporter untuk menyampaikan kepada redaktur dan diproses pemuatannya di media;
- Tersedia sarana telekomunikasi untuk membantu reporter yang hadir segera menyampaikan berita tersebut kepada redaktur;
- Rilis media dibagikan kepada jurnalis yang hadir untuk menghindari terjadinya salah kutip, keliru pengejaan atau dikutip diluar konteks;
- Untuk memperkuat informasi utama, dapat didukung dengan materi lain yang relevan seperti hasil riset, atau kondisi masyarakat terdampak (*human interest*).

g. Rilis Media (*Press release*):

Press Release merupakan naskah tentang pernyataan atau informasi tertentu yang disiapkan oleh nara sumber dan dibagikan kepada sejumlah media, sebagai bahan pemberitaan.





Selain naskah, *Press Release* dapat juga dilengkapi dengan statistik, grafis, foto, video dan sebagainya.

Informasi yang terkandung dalam *Press Release* yang baik mencakup informasi terbaru, lengkap dengan detail yang relevan serta bermanfaat bagi khalayak luas. Kesemuanya disampaikan secara ringkas dengan mencantumkan siapa penanggungjawabnya.

Penyedia *Press Release* dapat juga mencantumkan *Embargo*, atau batasan waktu agar informasi tersebut tidak dimuat sebelum jam atau tanggal tertentu.

Informasi yang disampaikan dalam *Press Release* bukanlah iklan yang wajib dimuat oleh media. Redaktur berhak memutuskan layak atau tidaknya informasi tersebut dan melakukan penyuntingan sebelum dimuat sebagai berita.

7. Pemanfaatan berita

Berita yang dimuat media sangat kaya informasi yang dapat bermanfaat menunjang pekerjaan Anggota DPR. Namun dengan banyaknya media dan juga berita yang dimuat, perlu dilakukan seleksi agar hanya informasi relevan yang disajikan kepada Anggota DPR. Metode pemanfaatan berita pada umumnya mencakup:

a. Pemantauan media;

Pemantauan Media atau Media Monitoring adalah kegiatan memantau media atau beberapa media terkait topik pemberitaan atau tokoh tertentu, biasanya disebut **Keyword** (kata kunci). Selain konten berita dan di media mana saja dimuat, pemantauan media memperhitungkan pula frekuensi atau kuantitas pemuatan berita tersebut serta nuansa pemberitaan (positif atau negatif atau netral). Data ini lazim digunakan sebagai statistik untuk analisis liputan pemberitaan;

b. *Issue tracking*;

Issue Tracking adalah memantau pemberitaan terhadap suatu topik atau tokoh, serta sikap pemberitaan berbagai media terhadap topik atau tokoh tersebut, dengan fokus memperhatikan perkembangan dan/atau perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu;

Proses memilah, memilih dan merangkum berita cukup menyita waktu. Anggota DPR perlu menyediakan staf khusus untuk melakukan *Media Monitoring* atau *Issue Tracking*. Agar hasilnya lebih akurat dan relevan, akan lebih baik jika staf tersebut sudah mempunyai naluri politik. Sebagai alternatif, Anggota DPR dapat menggunakan jasa perusahaan profesional untuk mengerjakannya.

8. Evaluasi, Tindaklanjut dan Pelaporan.

Pada akhir kunjungan, Anggota DPR beserta tim perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan. Secara umum, evaluasi mencakup:

- Meninjau ulang laporan kegiatan & perbandingan terhadap harapan/ tolok ukur;
- Menganalisa faktor utama penyebab keberhasilan/kegagalan;
- Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan tindaklanjut;





Tindaklanjut yang dapat dilakukan setelah kunjungan ke Dapil mencakup:

- Menyampaikan temuan atau masalah ke Fraksi/Alat Kelengkapan DPR;
- Menghubungi lembaga/pejabat relevan secara tertulis & lisan;
- Memberikan laporan perkembangan kepada konstituen terkait;
- Pelibatan kelompok kepentingan dan pakar;
- Membentuk opini dan menggalang dukungan publik;

Dalam melakukan tindaklanjut, misalnya menyampaikan permasalahan secara tertulis kepada Alat Kelengkapan DPR atau kepada pejabat eksekutif terkait, sampaikan tembusan kepada konstituen sebagai bukti bahwa temuan benar-benar ditindaklanjuti serta untuk meningkatkan kredibilitas Anggota DPR di Dapilnya.

Semua rangkuman kegiatan, permasalahan dan temuan selama kunjungan ke Dapil selanjutnya dijadikan bahan laporan untuk disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPR, Fraksi dan DPP, serta konstituen/pemangku kepentingan terkait.

Bab 4

Indikator Kunjungan ke Dapil Yang Sukses

Keberhasilan kunjungan ke Dapil tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana serta berapa jumlah tamu atau peserta yang hadir. Keberhasilan kunjungan juga perlu memperhitungkan aspek kualitatif, seperti, namun tidak terbatas pada:



- Kelompok-kelompok kepentingan dapat menyampaikan permasalahan, harapan, pendapat, saran, permintaan;
- Informasi yang perlu disosialisasikan, tersampaikan kepada kelompok-kelompok sasaran;
- Terjalin kesepahaman antara kelompok kepentingan dengan Anggota DPR tentang tindak lanjut yang akan ditempuh;
- Anggota DPR mampu mengatasi permasalahan, memberikan solusi atau menghubungkan konstituen dengan lembaga/ pejabat yang berwenang;
- Konstituen diberi informasi tentang perkembangan tindak lanjut;
- Kelompok-kelompok kepentingan dilibatkan dalam proses tindak lanjut, apabila memungkinkan;



- Anggota DPR lebih mengenali karakter; permasalahan dan potensi Dapil;
- Konstituen lebih memahami fungsi DPR serta peran Anggota DPR;
- Terbangunnya saluran komunikasi berlanjut;
- Konstituen lebih merasa terwakili kepentingannya dan makin percaya terhadap Anggota DPR;



LAMPIRAN - II

CATATAN KOMITMEN

Nomor rujukan :

Tanggal :

Lokasi :

Isu Pokok :

.....

Komitmen kepada :

Metoda : Lisan / Tertulis

Komitmen :

.....

.....

Tenggat waktu :

MOU / Perjanjian : Ada / Tidak. Jika ada, lampirkan.

Rekaman/ Klipping : Ada / Tidak. Jika ada, lampirkan.

URL : Ada / Tidak. Jika ada, cantumkan

.....

Status :

Keterangan:

1. Isu Pokok: Permasalahan yang dihadapi atau aspirasi yang disampaikan oleh warga
2. Komitmen: Janji tindak lanjut atau solusi yang dikemukakan oleh Anggota DPR
3. Komitmen kepada: Individu atau kelompok kepada siapa komitmen tersebut disampaikan.
Contoh: kepada Warga Desa Negla, atau kepada komunitas relawan KB, dll
4. Status: Tindak lanjut yang dilakukan, bagaimana statusnya, perkiraan tanggal penuntasan, kendala yang dihadapi dsb.

LAMPIRAN - III

LAPORAN KUNJUNGAN RESES
<nama Anggota DPR>
ANGGOTA DPR

No.Anggota	
Fraksi	
Komisi	
Dapil	
Periode Reses sd

Misi / Tujuan Kunjungan:

1. <sebutkan misi / tujuan kunjungan>
2. <sebutkan misi / tujuan kunjungan>
3. <sebutkan misi / tujuan kunjungan>
4. <sebutkan misi / tujuan kunjungan>

DAFTAR ISI LAPORAN:

- I. Daftar Kegiatan Yang Telah Dilakukan
- II. Daftar Aspirasi/Isu
- III. Daftar Tindak Lanjut
- IV. Daftar Pencapaian Pada Reses Ini
- V. Laporan Per Kegiatan
- VI. Foto Kegiatan

I. DAFTAR KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

No.	Waktu	Kegiatan	Agenda/Tema	Peserta	Tempat/ area dapil

II. DAFTAR ASPIRASI/ISU

No.	Pihak yang menyampaikan Aspirasi	Aspirasi/ Isu/ Permasalahan	Rekomendasi/ Solusi	Perlu Tindak Lanjut Ya / Tidak ?

III. DAFTAR TINDAK LANJUT

No.	Tindakan yang PERLU dilakukan sebagai tidak lanjut aspirasi	Hasil yang diharapkan	Pihak Strategis yang Terlibat	Strategi Komunikasi	Batas Waktu

IV. DAFTAR PENCAPAIAN PADA RESES INI

No.	Kegiatan / Aksi tindak lanjut yang TELAH dilakukan	Hasil yang dicapai	Penerima manfaat	Asal Aspirasi

V. LAPORAN RESES PER KEGIATAN**A. <contoh : Dialog Publik >**

Tanggal : _____

Tempat : _____

Yang Berpartisipasi	TOTAL
Anggota DPR	
Anggota DPRD	
Pejabat Pemerintah	
Organisasi Masyarakat Sipil	
Warga Masyarakat	
Media	
Universitas/lembaga riset	
Lain-lain	
TOTAL	

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

[Keterangan singkat tentang perlunya kegiatan ini dilakukan termasuk permasalahan yang ada di masyarakat, isu yang menjadi perhatian atau hal lain yang melatarbelakangi isu yang diangkat.]

2. TUJUAN KEGIATAN

[Hal yang ingin dicapai dengan kegiatan ini]

3. RINGKASAN PROSES KEGIATAN

[Penjelasan mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang dibuat secara ringkas namun menggambarkan proses kegiatan secara menyeluruh. Sebutkan pihak-pihak strategis yang terlibat dan dinamika yang terjadi dalam forum]

4. HASIL KEGIATAN

[Keterangan mengenai hal-hal yang dapat dicapai melalui kegiatan ini, termasuk 1) bagaimana kegiatan ini telah memberi kontribusi atau memberikan dampak jangka panjang terhadap tujuan yang ingin dicapai; 2) bagaimana kegiatan ini berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat; atau 3) kesepakatan apa yang dapat dibuat antara Anggota DPR, masyarakat dan /atau dengan pihak lainnya]

5. TINDAK LANJUT KEGIATAN

[Memaparkan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama atau lebih besar, termasuk rencana implementasinya. Memaparkan juga pembelajaran (lesson learned) dan best practice yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini]

B. <contoh : Dialog Publik >

Tanggal : _____
Tempat : _____

Yang Berpartisipasi	TOTAL
Anggota DPR	
Anggota DPRD	
Pejabat Pemerintah	
Organisasi Masyarakat Sipil	
Warga Masyarakat	
Media	
Universitas/lembaga riset	
Lain-lain	
TOTAL	

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

[Keterangan singkat tentang perlunya kegiatan ini dilakukan termasuk permasalahan yang ada di masyarakat, isu yang menjadi perhatian atau hal lain yang melatarbelakangi isu yang diangkat.]

2. TUJUAN KEGIATAN

[Hal yang ingin dicapai dengan kegiatan ini]

3. RINGKASAN PROSES KEGIATAN

[Penjelasan mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang dibuat secara ringkas namun menggambarkan proses kegiatan secara menyeluruh. Sebutkan pihak-pihak strategis yang terlibat dan dinamika yang terjadi dalam forum]

4. HASIL KEGIATAN

[Keterangan mengenai hal-hal yang dapat dicapai melalui kegiatan ini, termasuk 1) bagaimana kegiatan ini telah memberi kontribusi atau memberikan dampak jangka panjang terhadap tujuan yang ingin dicapai; 2) bagaimana kegiatan ini berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat; atau 3) kesepakatan apa yang dapat dibuat antara Anggota DPR, masyarakat dan /atau dengan pihak lainnya]

5. TINDAK LANJUT KEGIATAN

Memaparkan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama atau lebih besar, termasuk rencana implementasinya. Memaparkan juga pembelajaran (lesson learned) dan best practice yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini

C. <contoh : Dialog Publik >

Tanggal : _____

Tempat : _____

Yang Berpartisipasi	TOTAL
Anggota DPR	
Anggota DPRD	
Pejabat Pemerintah	
Organisasi Masyarakat Sipil	
Warga Masyarakat	
Media	
Universitas/lembaga riset	
Lain-lain	
TOTAL	

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

[Keterangan singkat tentang perlunya kegiatan ini dilakukan termasuk permasalahan yang ada di masyarakat, isu yang menjadi perhatian atau hal lain yang melatarbelakangi isu yang diangkat.]

2. TUJUAN KEGIATAN

[Hal yang ingin dicapai dengan kegiatan ini]

3. RINGKASAN PROSES KEGIATAN

[Penjelasan mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang dibuat secara ringkas namun menggambarkan proses kegiatan secara menyeluruh. Sebutkan pihak-pihak strategis yang terlibat dan dinamika yang terjadi dalam forum]

4. HASIL KEGIATAN

[Keterangan mengenai hal-hal yang dapat dicapai melalui kegiatan ini, termasuk 1) bagaimana kegiatan ini telah memberi kontribusi atau memberikan dampak jangka panjang terhadap tujuan yang ingin dicapai; 2) bagaimana kegiatan ini berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat; atau 3) kesepakatan apa yang dapat dibuat antara Anggota DPR, masyarakat dan /atau dengan pihak lainnya]

5. TINDAK LANJUT KEGIATAN

[Memaparkan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama atau lebih besar, termasuk rencana implementasinya. Memaparkan juga pembelajaran (lesson learned) dan best practice yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini]

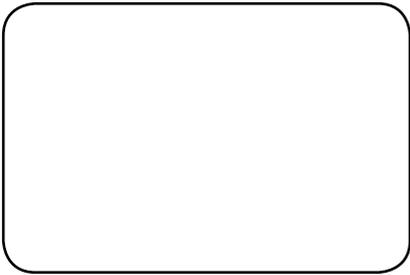
VI. FOTO KEGIATAN



<keterangan foto>



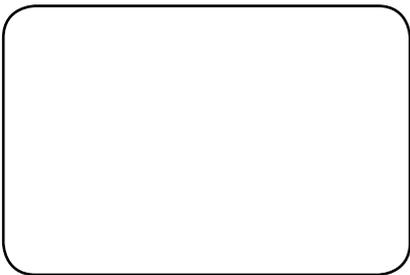
<keterangan foto>



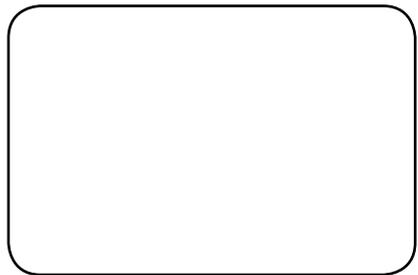
<keterangan foto>



<keterangan foto>



<keterangan foto>



<keterangan foto>

TENTANG PROREP

USAID/Program Representasi (ProRep) adalah sebuah proyek pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berdurasi empat hingga lima tahun yang diimplementasikan oleh Chemonics International. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas representasi di Indonesia dengan meningkatkan efektivitas kelompok serta institusi yang bekerja untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah dan dengan meningkatkan transparansi dan efektifitas proses legislatif. Dalam melaksanakan programnya, ProRep bermitra dengan Urban Institute, Social Impact, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website www.prorep.or.id atau hubungi kami melalui surat elektronik pada alamat info@prorep.or.id.

TENTANG PENULIS

Alvin Lie pernah dikenal sebagai “Koboi DPR” ketika menjabat sebagai Anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, akrab dengan media, membuatnya menjadi salah satu anggota DPR yang paling sering dikutip media saat itu. Bahkan wartawan-wartawan yang meliput DPR sempat memberinya penghargaan sebagai salah satu dari “10 Anggota DPR Terbaik” pada tahun 2002.

Sebagai Magister Sains bidang Administrasi Publik dari Universitas Diponegoro, Alvin memadukan pengalaman dengan ilmu, teori dengan praktik, agar lebih sistematis dalam menjalankan kerja-kerja politik di Senayan.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Rakyat, Alvin membidani kelahiran dan kemudian dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi “Jurnal Parlemen”, sebuah portal berita yang mengkhususkan diri memberitakan proses pembuatan kebijakan dan dinamika politik yang terjadi di DPR dan DPD RI. Aktifitas dibidang media ini digeluti selama 3 tahun dari 2010 hingga 2013.



Selanjutnya, Alvin dipercaya sebagai Ketua Komponen 3, bidang Penguatan Parlemen, di Program Representasi (ProRep) selama 2 tahun dari 2011 hingga 2013. Dalam kurun waktu itu terlaksana berbagai program kerjasama untuk meningkatkan efektifitas Anggota DPR dan Alat Kelengkapan DPR. JABAT (Jangkau dan Libatkan) adalah salah satu program yang lahir atas inisiatif Alvin.

Berbekal pengetahuan dan pengalaman di Parlemen baik sebagai Anggota, media peliput kegiatan parlemen maupun lembaga yang bermitra dan mendukung kegiatan Parlemen, Alvin kini berprofesi sebagai Konsultan Hubungan Keparlemenan. Walau demikian, Alvin tetap menjalin kerjasama dengan ProRep sebagai Advisor/Penasehat untuk program-program penguatan Parlemen. Buku panduan ini merupakan salah satu hasil dari kerjasama tersebut.

TENTANG KEMITRAAN BAGI PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan adalah organisasi multi-stakeholder yang bekerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal. Kemitraan membangun hubungan yang penting antara pemerintah di semua tingkat dan masyarakat sipil untuk secara konsisten mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Kemitraan berkontribusi terhadap penulisan buku ini dengan memberikan masukan dalam bentuk hikmah/*lessons learned* dan tata laksana yang baik/*good practices* dari program Jabat. Program JABAT – Jangkau dan Libatkan, adalah sebuah program kerjasama antara ProRep dan Kemitraan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Anggota DPR dengan konstituennya dengan cara memfasilitasi Anggota DPR dalam melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya.

Buku ini ditujukan untuk membantu para Anggota DPR beserta stafnya melakukan kegiatan ke daerah pemilihan dan mengambil manfaat maksimal dari kegiatan tersebut.

Buku ini memaparkan secara runut langkah-langkah untuk merencanakan, melaksanakan serta menindaklanjuti kunjungan ke Daerah Pemilihan secara lebih efektif dan bermakna yang dilakukan oleh Anggota DPR secara reguler.

Program Representasi (ProRep)

Gedung BRI II Suite 2806

Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA

Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016,

Email: info@prorep.or.id - www.prorep.or.id



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

PROREP
PROGRAM REPRESENTASI